

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2022



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022.

LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dalam mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Secara garis besar dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan menyajikan perencanaan kinerja dan pencapaian target, faktor-faktor yang merupakan keberhasilan/kegagalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan selama Tahun 2022 serta memuat aspek keuangan yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja pada tahun berikutnya dan Dengan tersusunnya LAKIP Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong tercapainya Visi Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 “Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera”.

Teluk Dalam, Maret 2023

Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Nias Selatan,

INTANSANI HARIA, SE, MM
PEMBINA TK.I
NIP. 19730919 199303 2 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	5
1.3. Gambaran Umum Organisasi.....	5
2.1.1. Kedudukan.....	5
2.1.2. Tugas.....	6
2.1.3. Fungsi.....	7
1.4. Struktur Organisasi.....	7
1.5. Sumber Daya Manusia	10
1.6. Sarana dan Prasarana.....	11
1.7. Isu Strategis.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1. Rencana Strategis	15
2.2. Visi dan Misi.....	16
2.3. Tujuan dan Sasaran	16
2.1.3. Tujuan	16
2.1.4. Sasaran	17
2.4. Strategi Kebijakan dan Program.....	17
2.5. Perjanjian Kinerja.....	18
2.6. Rencana Kerja Tahunan.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	
3.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	23
3.2. Membandingkan Antara Realiasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Beberapa Tahun Terakhir	54
3.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah.....	54
3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan	57
3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	59
3.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	60
B. REALISASI ANGGARAN	61
BAB IV PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2022.....	26
Tabel 2.	Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2022.....	28
Tabel 3.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Persyaratan Semester I Tahun 2022	29
Tabel 4.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Persyaratan Semester II Tahun 2022	30
Tabel 5.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur Semester I Tahun 2022	31
Tabel 6.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur Semester II Tahun 2022	32
Tabel 7.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Waktu Penyelesaian Semester I Tahun 2022	33
Tabel 8.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Waktu Penyelesaian Semester II Tahun 2022	34
Tabel 9.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Biaya/Tarif Semester I Tahun 2022	35
Tabel 10.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Biaya/Tarif Semester II Tahun 2022	36
Tabel 11.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Semester I Tahun 2022	37
Tabel 12.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Semester II Tahun 2022.	38
Tabel 13.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Kompetensi Pelaksana Semester I Tahun 2022.	39
Tabel 14.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Kompetensi Pelaksana Semester II Tahun 2022	40
Tabel 15.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Perilaku Pelaksana Semester I Tahun 2022	41
Tabel 17.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Perilaku Pelaksana Semester II Tahun 2022	42
Tabel 19.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana Semester I Tahun 2022	43
Tabel 20.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana Semester II Tahun 2022	44
Tabel 21.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Semester I Tahun 2022	45
Tabel 22.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Semester II Tahun 2022.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Nilai Rata-rata per Unsur Layanan Semester I Tahun 2022.....	27
Gambar 2.	Nilai Rata-rata per Unsur Layanan Semester II Tahun 2022.....	28
Gambar 3.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Persyaratan Semester I Tahun 2022.....	29
Gambar 4.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Persyaratan Semester II Tahun 2022.....	30
Gambar 5.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur Semester I Tahun 2022.....	31
Gambar 6.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur Semester II Tahun 2022.....	32
Gambar 7.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Waktu Penyelesaian Semester I Tahun 2022.....	33
Gambar 8.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Waktu Penyelesaian Semester II Tahun 2022.....	34
Gambar 9.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Biaya/Tarif Semester I Tahun 2022.....	35
Gambar 10.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Biaya/Tarif Semester II Tahun 2022.....	36
Gambar 11.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Produk Spesifikasi Layanan Semester I Tahun 2022.....	37
Gambar 12.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Produk Spesifikasi Layanan Semester II Tahun 2022.....	38
Gambar 11.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Kompetensi Pelaksana Semester I Tahun 2022.....	39
Gambar 12.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Kompetensi Pelaksana Semester II Tahun 2022.....	40
Gambar 16.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Perilaku Pelaksana Semester I Tahun 2022.....	41
Gambar 13.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Perilaku Pelaksana Semester II Tahun 2022.....	42
Gambar 14.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana Semester I Tahun 2022.....	43
Gambar 20.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana Semester II Tahun 2022.....	44
Gambar 21.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Semester I Tahun 2022.....	45
Gambar 15.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Semester II Tahun 2022.....	46

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Kenaikan IKM dari Triwulan II Tahun 2021 sampai dengan Triwulan I Tahun 2022	24
Grafik 2. Kenaikan IKM dari Triwulan I sampai dengan Triwulan II Tahun 2022	25

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Lembar Verifikasi
- Lampiran 2. Matriks Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan
- Lampiran 3. Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan TA. 2022
- Lampiran 4. Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan TA. 2022
- Lampiran 5. Rencana Aksi Perubahan Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan TA. 2022
- Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan TA. 2022
- Lampiran 7. Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan TA. 2022
- Lampiran 8. Laporan Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan TA. 2022
- Lampiran 9. Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021
- Lampiran 10. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan TA. 2022
- Lampiran 11. Tampilan Aplikasi OSS dalam Pelayanan Perizinan

Halaman 43, 44 dan 46 cetak ulang
Daftar isi, kata pengantar dan BAB IV cetak ulang
Print Realisasi kinerja di pendukung sakip nomor 7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

A. Dasar Pembentukan

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan terhadap publik serta pemberdayaan peran serta masyarakat.

Komitmen Kepala Daerah untuk mendukung program Pemerintah Pusat dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Government), dicerminkan dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan, Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15_17 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Nias Selatan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Maka dengan telah dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah diharapkan agar Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya dibidang Perizinan dan Non Perizinan dapat

terselenggara dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dengan tujuan agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang.

Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 dilandasi dasar Hukum sebagai berikut :

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Undang – Undang nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pak - Pak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
- d. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
- e. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

- g. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- h. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa Pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- s. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- t. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- u. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- v. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan naskah Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan.
- w. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten Nias Selatan.
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- y. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan.
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2017;

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2022 adalah :

1. Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
4. Tertibnya pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1. Kedudukan

Pada tahun 2003 Kabupaten Nias Selatan memisahkan diri pada Kabupaten Induk dan memekarkan menjadi sebuah Kabupaten definitif berdasarkan UU Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Nias Selatan. Kabupaten Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4272).

Salah satu instansi pemerintah yang dibentuk saat itu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang berlokasi di Jln. Diponegoro Kel. Pasar Telukdalam Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan tepat berada di tengah kota. Instansi itu bergerak di bidang Izin Perusahaan UD, CV, Koperasi, dan PT.

Pada bulan maret 2013 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pindah di Jln. Diponegoro Kel. Pasar Telukdalam di gabungkan dengan kantor keuangan dan nomenklatur menjadi Badan Perizinan Terpadu, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPK2KAD). Kemudian pada bulan juli 2015 memisahkan diri dari Dinas Pendapatan Daerah, menjadi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kembali menjadi Kabupaten Nias Selatan.

Kemudian pada bulan juli 2015 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan telah pindah lokasi ke Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Teluk dalam sampai dengan saat ini dengan gedung perkantoran yang baru.

DPMPTSP Kabupaten Nias Selatan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Nias Selatan.

Berikut ini adalah Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan :

a. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan.

Visi : Mewujudkan masyarakat yang maju, sehat dan cerdas dengan kepemimpinan yang melayani, jujur dan sederhana.

Misi : 1. Membangun kultur pemerintahan yang bersih, mandiri, transparan yang berorientasi pada masyarakat.
2. Mengembangkan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mendapatkan investor.

1.3.2. Tugas

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
- 2) Melaksanakan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- 3) Melaksanakan Program Promosi Penanaman Modal

- 4) Melaksanakan Program Pelayanan Penanaman Modal.
- 5) Melaksanakan Program Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 6) Melaksanakan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1.3.3. Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan mempunyai uraian tugas dan fungsi, berdasarkan pada Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5.-52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

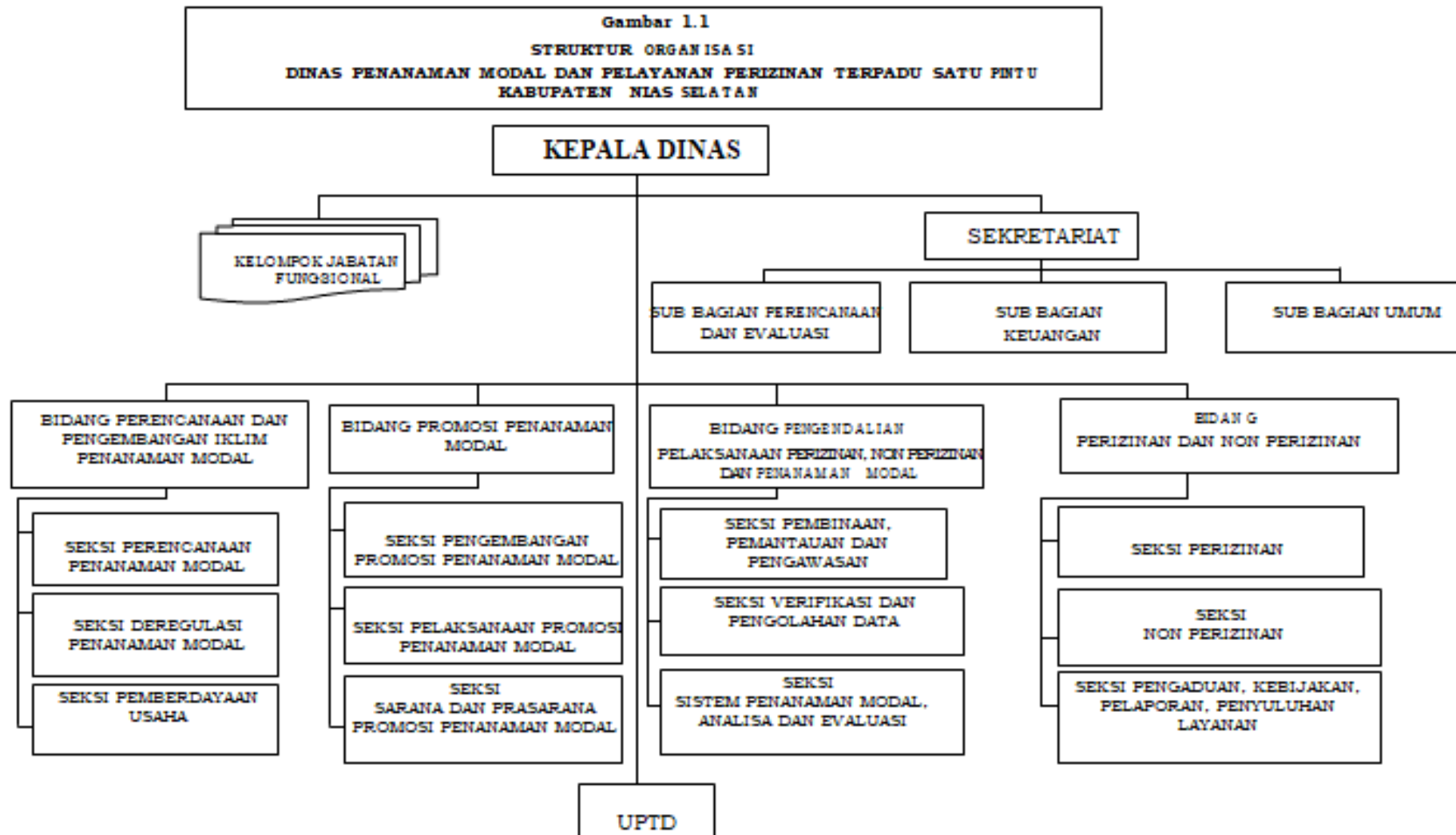
- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan perizinan,
- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan perizinan,
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan perizinan, dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang penanaman modal dan perizinan.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan, sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat yang membawahi ;
 - Subbagian Perencanaan dan Evaluasi ;
 - Subbagian Keuangan; dan

- Subbagian Umum.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari :
 - Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 - Seksi Deregulasi Penanaman Modal;
 - Seksi Pemberdayaan Usaha.
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
 - Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 - Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;
 - Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari :
 - Seksi Pembinaan, Pemantauan, dan Pengawasan;
 - Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data;
 - Seksi Sistem Penanaman Modal, Analisa dan Evaluasi.
- f. Bidang Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari :
 - Seksi Perizinan;
 - Seksi Non Perizinan;
 - Seksi Pengaduan, Keijakan, Pelaporan, Penyuluhan Layanan.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



1.5. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan per 31 Desember 2022 berjumlah 22 orang yang diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan, sebagai berikut:

a. Berdasarkan Golongan

Golongan	a	B	c	d	Jumlah
I	-	-	-	-	-
II	-	1	-	1	2
III	1	2	7	7	17
IV	1	2	-	-	3
				Total	22

b. Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	12
4	Staf	4
	Total	22

c. Berdasarkan Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah
1	S-3	-
2	S-2	8
3	S-1/DIV	10
4	DIII	2
5	SLTA	2
6	SLTP	-
7	SD	-
	Total	22

1.6. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana (Sapras) kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan saat ini secara kuantitatif sudah sebanding dengan beban pekerjaan. Namun secara kualitas ada beberapa sapras yang masih butuh diperbaiki dan peremajaan seperti : perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan prima. Adapun Sapras kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan untuk menunjang kelancaran tugas adalah sebagai berikut :

1. Ruang Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan didesain dengan ruang pelayanan yang digunakan untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Ruang pelayanan berada di ruangan yang cukup luas, dengan fasilitas yang kurang memadai untuk menunjang pelayanan publik, dalam proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel. Lantai yang selalu terlihat bersih, hawa ruangan yang terasa sejuk dan ruangan tertata rapi.

2. Loker Customer Service dan Pelayanan

Di loket *Costumer Service* dan loket pelayanan, petugas siap memberikan berbagai informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pemohon terkait permohonan perizinan dan non perizinan dengan penuh keramahan, sopan, murah senyum, dan interaktif.

3. Ruang Laktasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan juga menyediakan Ruang Laktasi yang disediakan untuk pegawai maupun pemohon yang ingin memberikan ASI pada bayinya

4. Loker Pengaduan

Kotak Pengaduan merupakan salah satu media atau fasilitas pengaduan yang dapat di gunakan oleh pemohon izin jika ada keluhan maupun pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan

5. Aksesibilitas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Menyediakan Aksesibilitas (Kursi Roda Pasien) untuk memudahkan penyandang *disabilitas*, atau manula yang ingin mengajukan permohonan perizinan.

6. Kotak Saran

Kotak Saran disediakan sebagai sarana bagi pemohon untuk menyampaikan saran bahkan kritik kepada petugas layanan maupun kepada instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan secara umum, dalam rangka perbaikan pelayanan dimasa mendatang.

7. Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Menyediakan APAR untuk meminimalisir resiko bencana kebakaran di lingkungan kantor.

8. Wi-fi

Fasilitas tambahan yang tersedia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan adalah penyediaan Wi-fi dalam mendukung kelancaran pelayanan perizinan kepada masyarakat.

1.7. ISU STRATEGIS

Permasalahan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu merupakan perbedaan harapan antara kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perumusan permasalahan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu di masa lalu, dilakukan dengan menganalisis lingkungan internal maupun eksternal. Permasalahan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu yang teridentifikasi menjadi input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai platform Bupati. Permasalahan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penciptaan iklim investasi yang kondusif
2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat (pelaku usaha)
3. Peningkatan tata kelola pelayanan perizinan
4. Peningkatan kualitas pegawai
5. Peningkatan dalam penerapan sistem teknologi informasi
6. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi
7. Pengembangan sarana dan prasarana.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan RPJMD. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022-2026 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Nias Selatan Tahun 2022-2026 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022-2026.

Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2022-2026.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022-2026, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Renstra Tahun 2022-2026 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022-2026. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2022-2026.

2.2. VISI DAN MISI

1. PERNYATAAN VISI

Yang menjadi Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan yang sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Periode 2021-2026 yaitu :

“Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera”

Penjabaran makna dari Visi tersebut yaitu:

- **Nias Selatan Maju** adalah masyarakat yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat.
- **Masyarakat Sejahtera** adalah masyarakat yang sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat berpikir positif, bekerja dengan maksimal dan memiliki semangat dan daya juang yang tinggi serta tidak mudah menyerah, sehingga kebutuhan pokoknya dapat terpenuhi secara mandiri dan berkesinambungan.

2. PERNYATAAN MISI

Untuk mencapai Visi maka yang menjadi Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan sejalan dengan misi Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan periode 2021-2026 yaitu:

1. Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan;
2. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik
2. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di PTSP
2. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat

Tabel. 2.1. Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik		LAKIP OPD	B	B	B	B	B
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di PTSP	IKM	B	B	B	B	B
2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5

		Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Persentase Penerbitan Izin yang diajukan oleh pelaku usaha	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	--	--	------	------	------	------	------

2.4. STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 adalah didasarkan pada strategi dan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan yang berkaitan dengan bidang penanaman modal dan perizinan sebagai berikut :

Strategi	Kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan sistem tata kerja birokrasi. - Melakukan penataan kebutuhan organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien serta didukung SDM aparatur yang memiliki kompetensi dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah.
Menciptakan peluang dan kesempatan berusaha.	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kemudahan izin berusaha pada masyarakat kurang mampu. - Memberikan jaminan hukum dan kemudahan izin usaha bagi investor.

Program dan Kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan PD Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD
 - b. Administrasi Keuangan PD

- c. Administrasi Umum PD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang urusan PD
 - f. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
 3. Program Promosi Penanaman Modal
 - a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 4. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 6. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanamal modal
 - a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.5. PERJANJIAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka

setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan RPJMD Tahun 2021 s/d 2026 adalah sebagai berikut :

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di PPTSP	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B
2.	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	2. Persentase Penerbitan Izin yang diajukan oleh pelaku usaha	100 %

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	748.100.000,-	
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0,-	
3.	Program Promosi Penanaman Modal	0,-	
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	0,-	
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	379.175.000,-	
JUMLAH		1.127.275.000,-	

Pada Tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa anggaran dari beberapa program mengalami penurunan dari anggaran sebelumnya, Total Anggaran Tahun 2022 adalah yaitu 1.127.275.000,- (Satu Milyar Seratus Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan anggaran sebelumnya Rp. 3.026.080.704,- (Tiga Milyar Dua Puluh Enam Juta Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah).

B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	(2)	3	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di PPTSP	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B
2.	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	2. Persentase Penerbitan Izin yang diajukan oleh pelaku usaha	100 %

No.	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	792.499.915,-	
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0,-	
3.	Program Promosi Penanaman Modal	0,-	
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	0,-	
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	379.175.000,-	
6.	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	0,-	
JUMLAH		1.171.674.915,-	

Pagu anggaran murni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan mengalami perubahan pada proses P-APBD Tahun Anggaran 2022. Pagu anggaran setelah perubahan mengalami sedikit kenaikan anggaran sebesar Rp. 44.399.915,-

C. Kesesuaian antara Indikator dan Target pada RPJM, Renstra, IKU, dan PK

Tabel 2.2. Tabel Kesesuaian antara Indikator dan Target pada RPJM, Renstra, IKU, dan PK

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2022			
				RPJMD	RENSTRA	IKU	PK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik		LAKIP OPD	B	B	B	B
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di PTSP	IKM	B	B	B	B
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	3.3	3.5	3.5	3.5
		Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Persentase Penerbitan Izin yang diajukan oleh pelaku usaha	100%	100%	100%	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 ini ada 4 aspek yang akan dibahas, yaitu :

- Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS);
- Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK);
- Keuangan;
- Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

- ❖ 90 – 100 : Amat Baik
- ❖ 80 – 89 : Baik
- ❖ 50 – 79 : Cukup Baik
- ❖ < 49 : Kurang

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran pencapaian sasaran adalah untuk mengetahui tingkat Pencapaian Sasaran dan Pencapaian Target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan.

A. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	(2)	3	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di PPTSP	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B
2.	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	2. Persentase Penerbitan Izin yang diajukan oleh pelaku usaha	100 %

No.	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	792.499.915,-	
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0,-	
3.	Program Promosi Penanaman Modal	0,-	
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	0,-	
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	379.175.000,-	
6.	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	0,-	
JUMLAH		1.171.674.915,-	

3.1. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di PTSP

A. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2022, memperoleh nilai sebesar 76,55 dari nilai

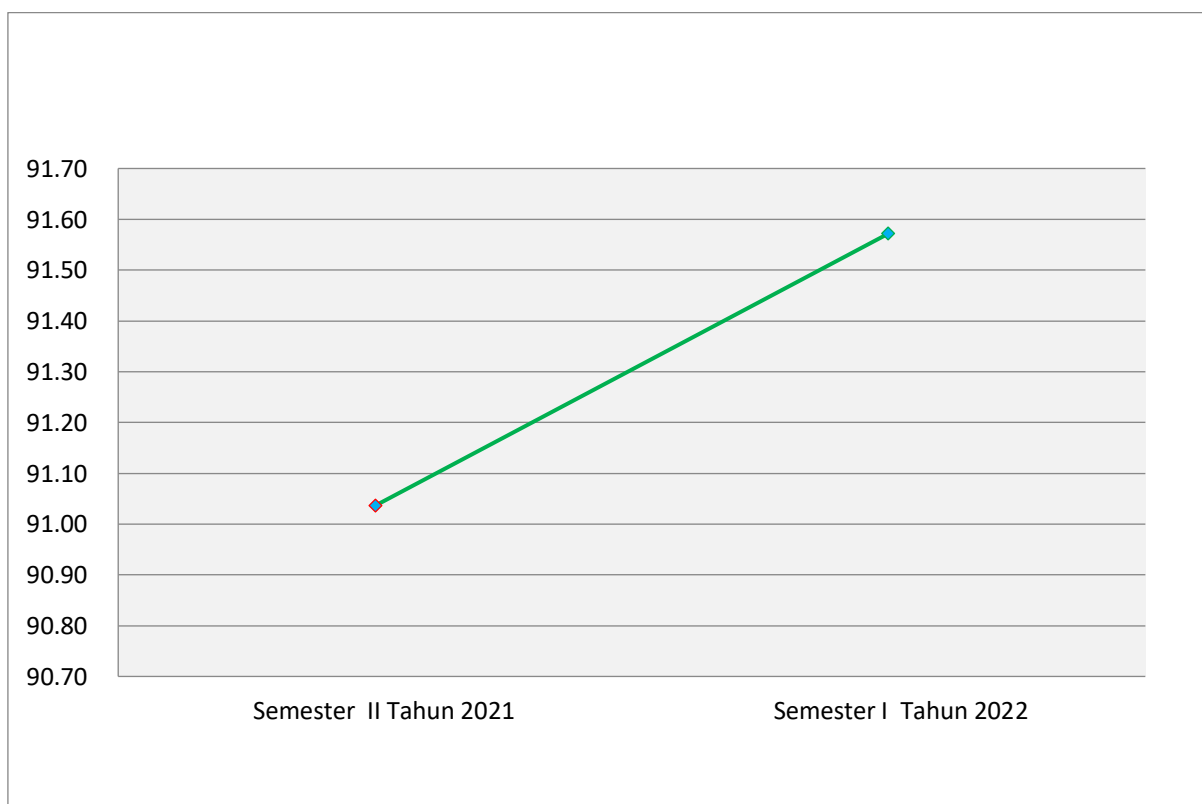
maksimal 100, maka dapat disimpulkan tergolong baik (B).
Terlampir

B. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

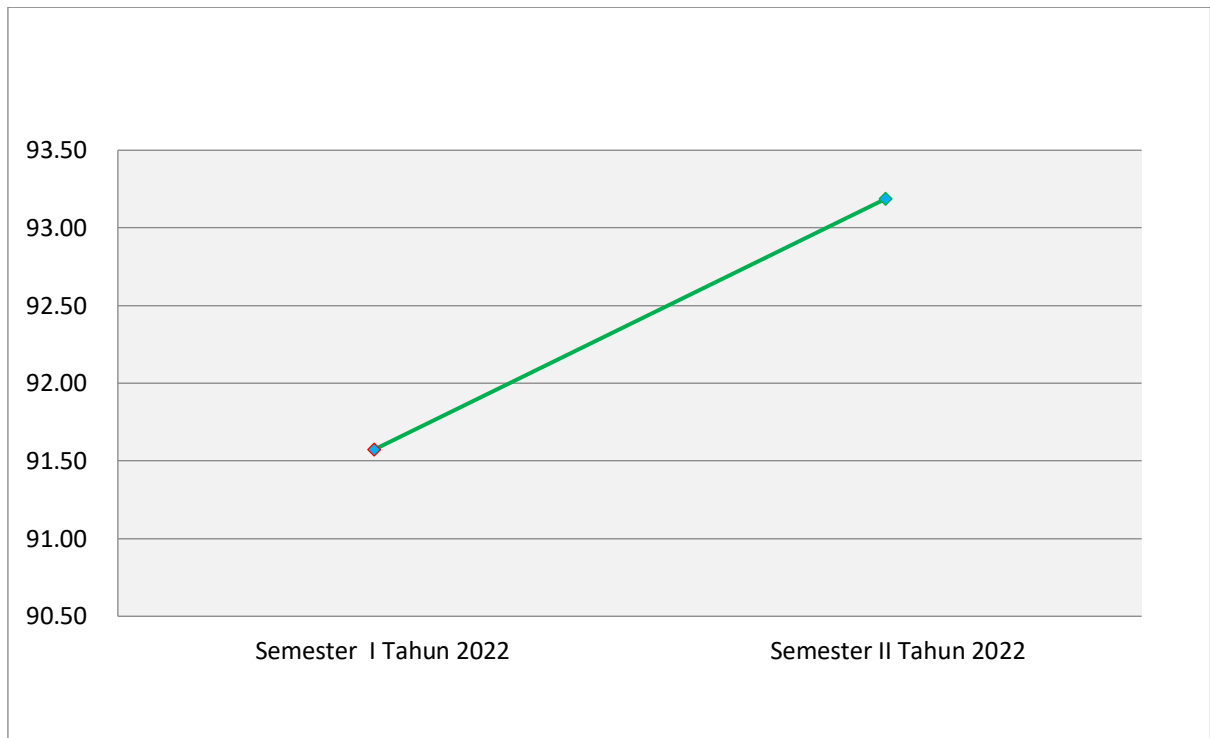
1. Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I dan Semester II

Nilai hasil survei IKM Semester I dan Semester II Tahun 2022 (periode Januari sampai dengan bulan Desember 2022) sebagai berikut :

No.	Periode Penilaian	Jumlah Responden	Nilai rata-rata	Nilai Indeks	Nilai SKM Konversi	Mutu Pelayanan
1.	Semester I	97 orang	33,299	91,572	3.663,	A
2.	Semester II	158 orang	33,886	93,187	3.727	A



Grafik kenaikan IKM dari Triwulan II Tahun 2021 sampai dengan Triwulan I Tahun 2022



**Grafik kenaikan IKM dari Triwulan I sampai dengan
Triwulan II Tahun 2022**

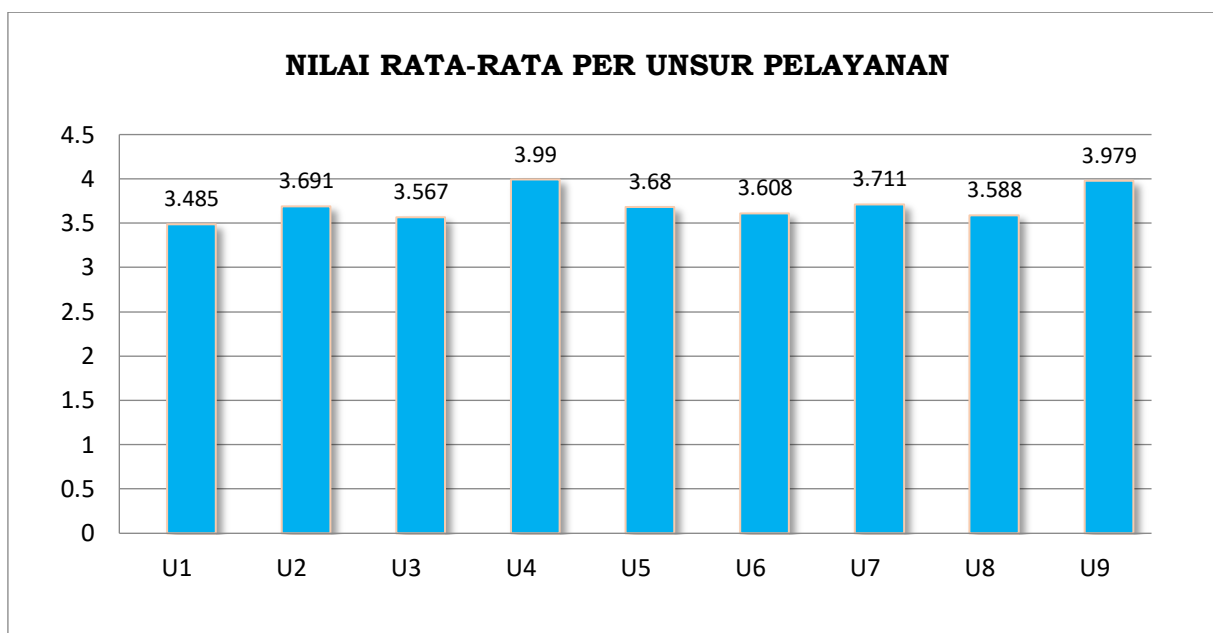
Dari hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut di atas diperoleh nilai IKM Semester I sebesar 91,572 dan nilai IKM Semester II sebesar 93,187. Nilai IKM Semester II mengalami kenaikan sebesar 2,1 % dari nilai Semester I Tahun 2022.

2. Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai hasil Survei IKM Semester I dan II Tahun 2022 pada DPMPPTSP Kabupaten Nias Selatan terhadap masing-masing unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

No.	Unsur SKM	Nilai rata-rata	Nilai Indeks	Nilai SKM Konversi	Mutu Pelayanan
1	2	3	4=	5 = 4 X 25	6
U1	Persyaratan Pelayanan	3,485	0,383	9,582	B
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,691	0,406	10,049	A
U3	Waktu Penyelesaian	3,567	0,392	9,809	A
U4	Biaya/Tarif	3,990	0,439	10,972	A
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,680	0,405	10,121	A
U6	Kompetensi Pelaksana	3,608	0,397	9.923	A
U7	Perilaku Pelaksana	3,711	0,408	10,206	A
U8	Sarana dan Prasaranan	3,588	0,395	9,866	A
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4,979	0,438	10,943	A
TOTAL NILAI		33,299	3,663	91,572	91,835

**Tabel 1. Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
Semester I Tahun 2022**

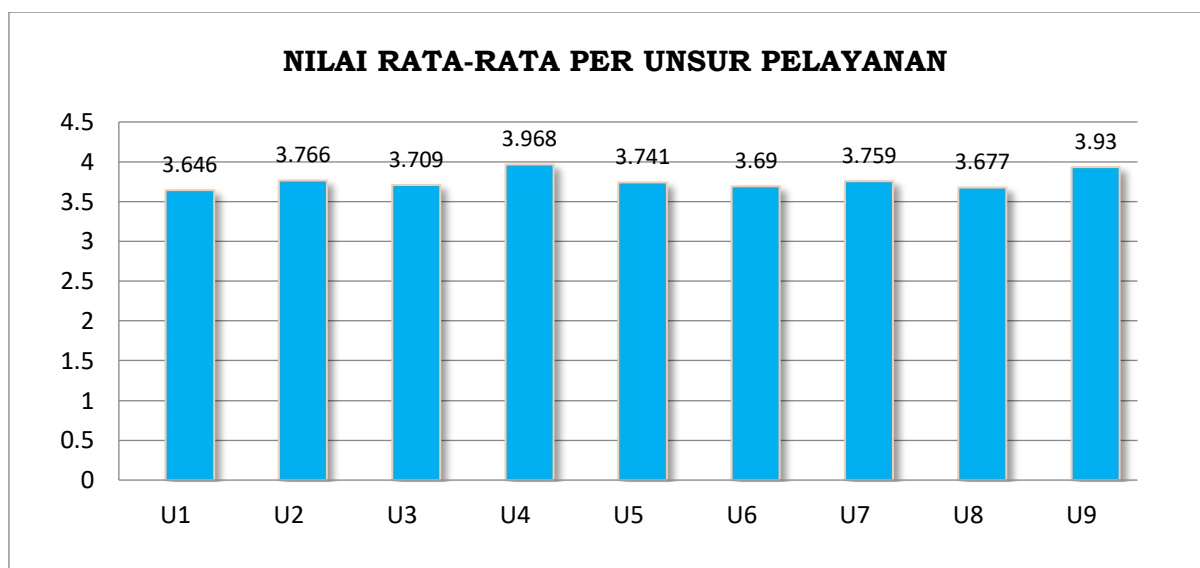


Gambar 1. Nilai Rata-rata per Unsur Layanan Semester I Tahun 2022

No.	Unsur SKM	Nilai rata-rata	Nilai Indeks	Nilai SKM Konversi	Mutu Pelayanan
1	2	3	4=	5 = 4 X	6
U1	Persyaratan Pelayanan	3,646	0,401	10,025	B
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,766	0,414	10,356	A
U3	Waktu Penyelesaian	3,709	0,408	10,199	A
U4	Biaya/Tarif	3,968	0,437	10,913	A
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,741	0,411	10,286	A
U6	Kompetensi Pelaksana	3,690	0,406	10,147	A
U7	Perilaku Pelaksana	3,759	0,414	10,339	A
U8	Sarana dan Prasarana	3,677	0,404	10,112	A

U9	Penanganan Pengaduan, dan Masukan	Saran	4,930	0,432	10,809	A
TOTAL NILAI			33,886	3,727	93,187	91,835

Tabel 2. Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2022



Gambar 2. Nilai Rata-rata per Unsur Layanan Semester II Tahun 2022

1. Persyaratan

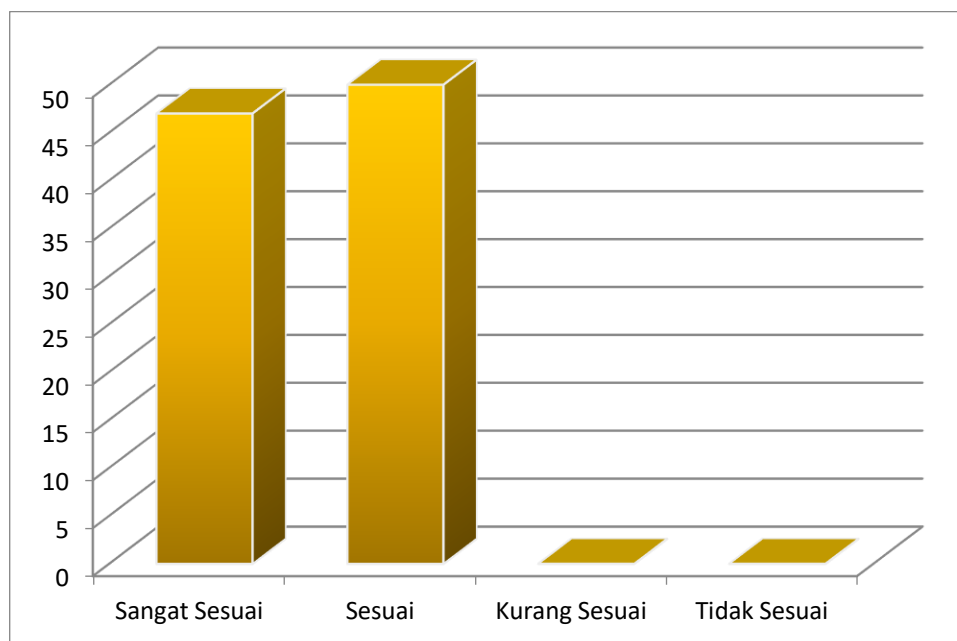
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata unsur persyaratan sebesar 3.485 berada pada nilai interval 3,485 s/d 4,00, dengan kinerja unit pelayanan **“Baik”**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan perizinan pada unsur persyaratan disajikan pada tabel berikut ini :

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			Frekwensi	%
1	Sangat Sesuai	4	47	48.5
2	Sesuai	3	50	50.8

3	Kurang Sesuai	2	0	0
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			97	99.3

Tabel 3. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Persyaratan Semester I Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



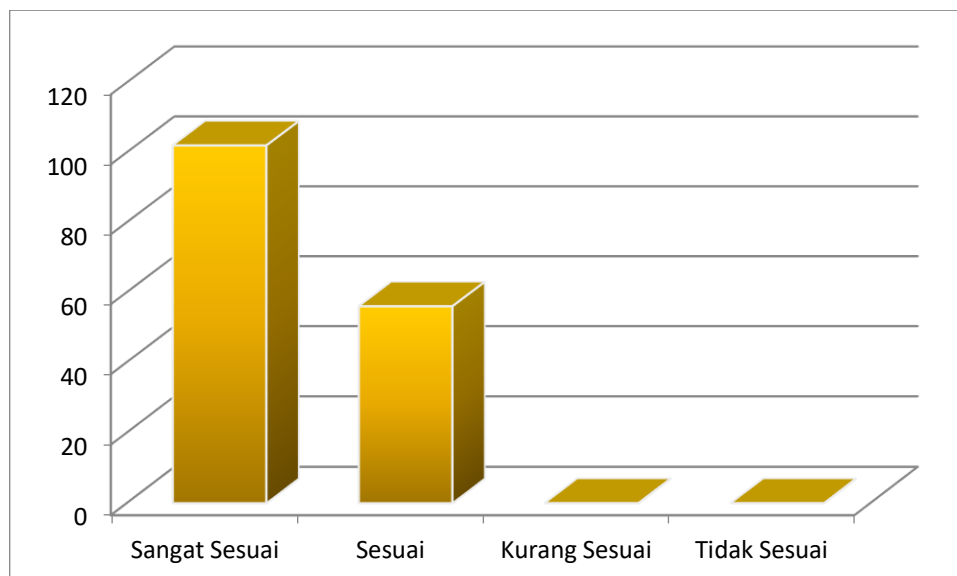
Gambar 3. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Persyaratan Semester I Tahun 2022

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata unsur persyaratan sebesar 3.646 berada pada nilai interval 3,646 s/d 4,00, dengan kinerja unit pelayanan "**Sangat Baik**". Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan perizinan pada unsur persyaratan disajikan pada tabel berikut ini :

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			Frekwensi	%
1	Sangat Sesuai	4	102	100.5
2	Sesuai	3	56	55
3	Kurang Sesuai	2	0	0
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			158	155.5

Tabel 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Persyaratan Semester II Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Gambar 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Persyaratan Semester II Tahun 2022

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

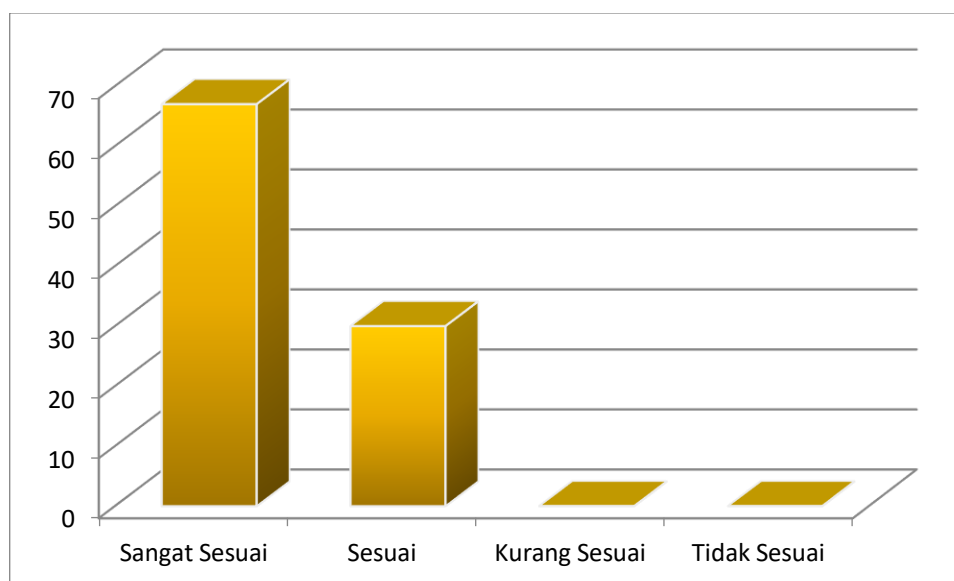
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar sebesar 3,691 berada pada nilai interval 3,691 s/d 4,00, dengan kinerja unit pelayanan **“Sangat Baik.”** Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat

pengguna layanan perizinan pada unsur sistem, mekanisme dan prosedur disajikan pada tabel berikut ini :

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			Frekwensi	%
1	Sangat Sesuai	4	67	75.5
2	Sesuai	3	30	30.5
3	Kurang Sesuai	2	0	0
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			97	106

Tabel 5. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur Semester I Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini



Gambar 5. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur Semester I Tahun 2022

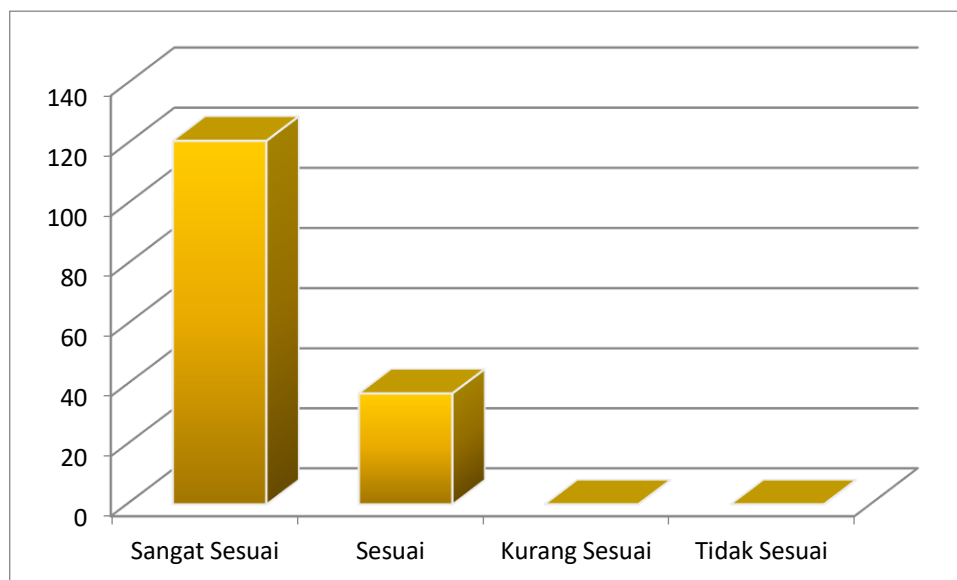
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil

analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,766 berada pada nilai interval 3,766 s/d 4,00, dengan kinerja unit pelayanan **“Sangat Baik.”**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan perizinan pada unsur sistem, mekanisme dan prosedur disajikan pada tabel berikut ini :

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			Frekwensi	%
1	Sangat Sesuai	4	121	100.5
2	Sesuai	3	37	35.5
3	Kurang Sesuai	2	0	0
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			158	136

Tabel 6. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur Semester II Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini



Gambar 6. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur Semester II Tahun 2022

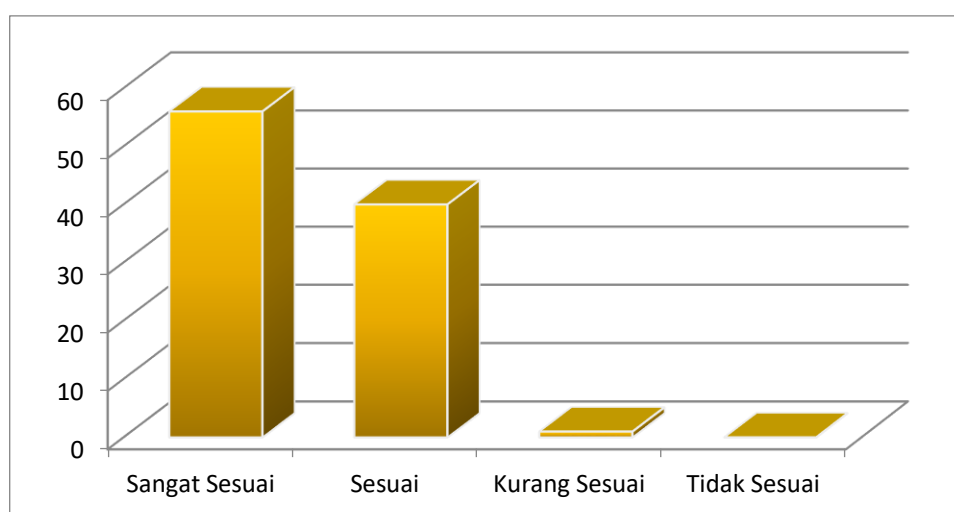
3. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,567 berada pada nilai interval 3,567 s/d 4,00, dengan kinerja unit pelayanan **“Sangat Baik”**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan perizinan, pada unsur waktu penyelesaian disajikan pada tabel berikut ini :

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			Frekwensi	%
1	Sangat Sesuai	4	56	60.5
2	Sesuai	3	40	40.2
3	Kurang Sesuai	2	1	1.3
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			97	102

Tabel 7. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Waktu Penyelesaian Semester I Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini



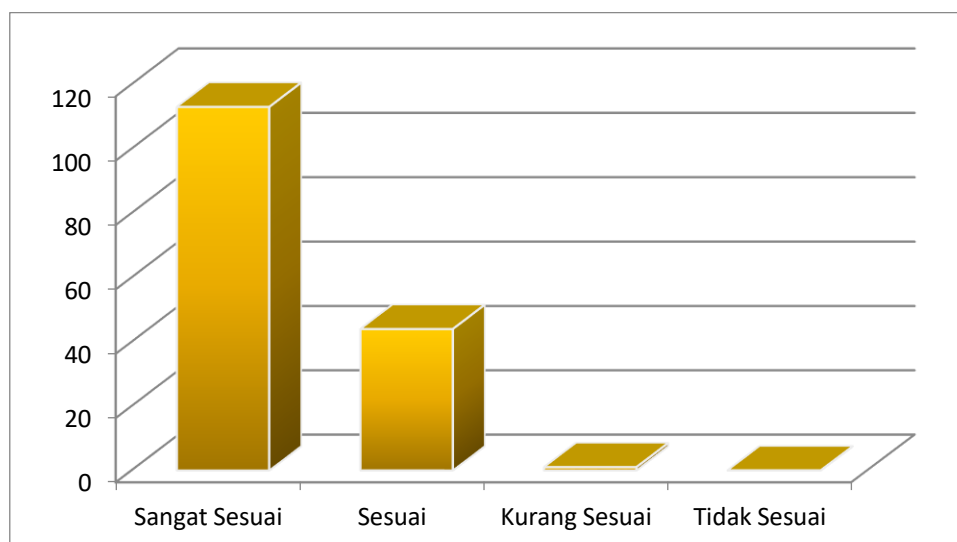
Gambar 7. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Waktu Penyelesaian Semester I Tahun 2022

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,709 berada pada nilai interval 3,709 s/d 4,00, dengan kinerja unit pelayanan **“Sangat Baik”**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan perizinan, pada unsur waktu penyelesaian disajikan pada tabel berikut ini :

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			Frekwensi	%
1	Sangat Sesuai	4	113	100.05
2	Sesuai	3	44	45.5
3	Kurang Sesuai	2	1	1.3
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			158	146.85

Tabel 8. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Waktu Penyelesaian Semester II Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Gambar 8. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Waktu Penyelesaian Semester II Tahun 2022

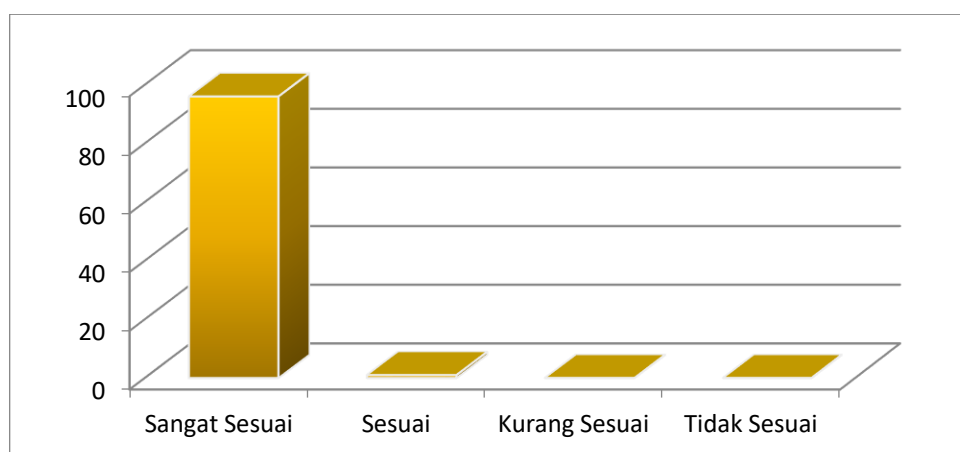
4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,990 berada pada nilai interval 3,990 s/d 4,00, dengan kinerja unit pelayanan **“Sangat Baik”**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan perizinan pada unsur biaya/tarif disajikan pada tabel berikut ini :

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			Frekwensi	%
1	Sangat Sesuai	4	96	89.5
2	Sesuai	3	1	1.05
3	Kurang Sesuai	2	0	0
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			97	90.55

Tabel 9. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Biaya/Tarif Semester I Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



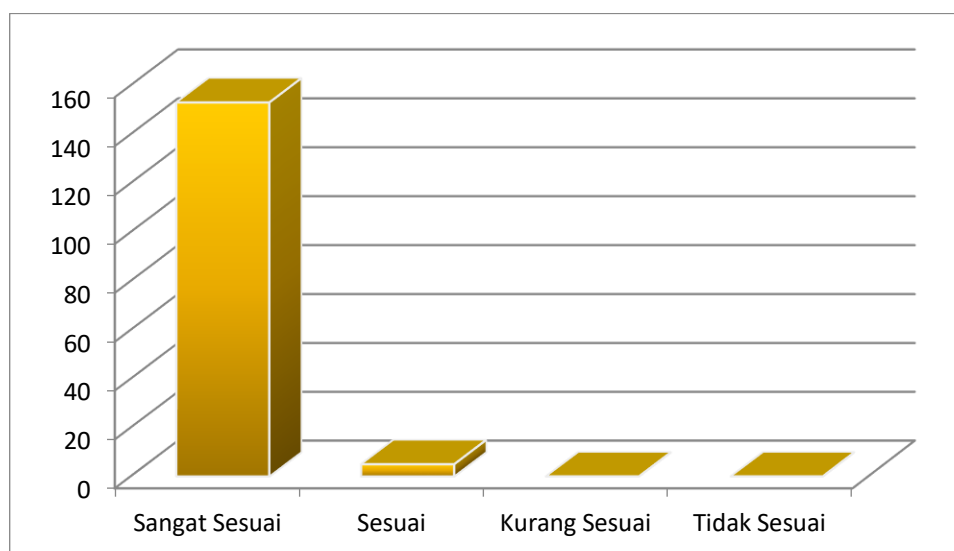
Gambar 9. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Biaya/Tarif Semester I Tahun 2022

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,968 berada pada nilai interval 3,968 s/d 4,00, dengan kinerja unit pelayanan **“Sangat Baik”**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan perizinan pada unsur biaya/tarif disajikan pada tabel berikut ini :

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			Frekwensi	%
1	Sangat Sesuai	4	153	100.5
2	Sesuai	3	5	2.5
3	Kurang Sesuai	2	0	0
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			158	103

Tabel 10. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Biaya/Tarif Semester II Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Gambar 10. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Biaya/Tarif Semester II Tahun 2022

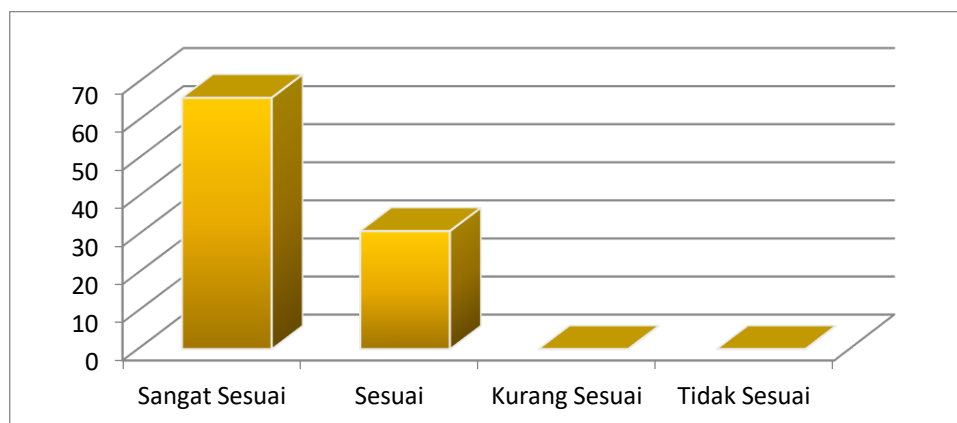
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,680 berada pada interval skor 3,680 s/d 4,00, dengan kinerja unit pelayanan **“Sangat Baik”**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan perizinan, pada unsur spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel berikut ini :

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			Frekwensi	%
1	Sangat Sesuai	4	66	70.5
2	Sesuai	3	31	32.5
3	Kurang Sesuai	2	0	0
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			97	103

Tabel 11. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Semester I Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



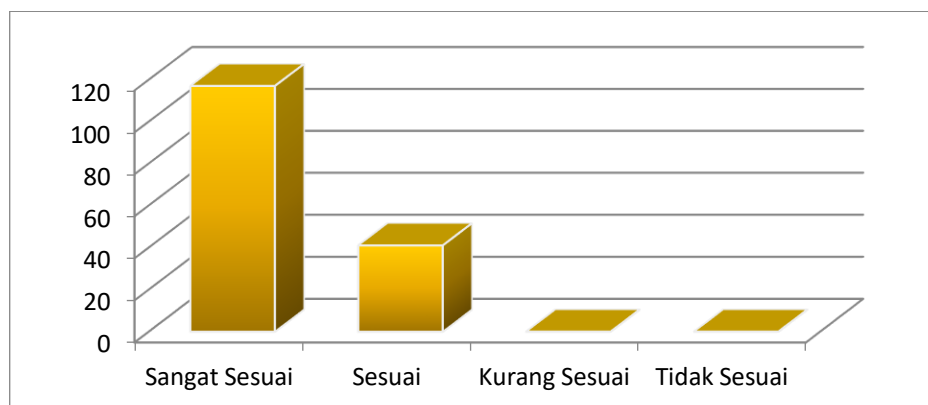
Gambar 11. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Produk Spesifikasi Layanan Semester I Tahun 2022.

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,741 berada pada interval skor 3,741 s/d 4,00, dengan kinerja unit pelayanan **“Sangat Baik”**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengunjalayanan perizinan, pada unsur spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel berikut ini

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			Frekwensi	%
1	Sangat Sesuai	4	117	100.5
2	Sesuai	3	41	40.5
3	Kurang Sesuai	2	0	0
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			158	141

Tabel 12. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Semester II Tahun 2022.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Gambar 12. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Produk Spesifikasi Layanan Semester II Tahun 2022.

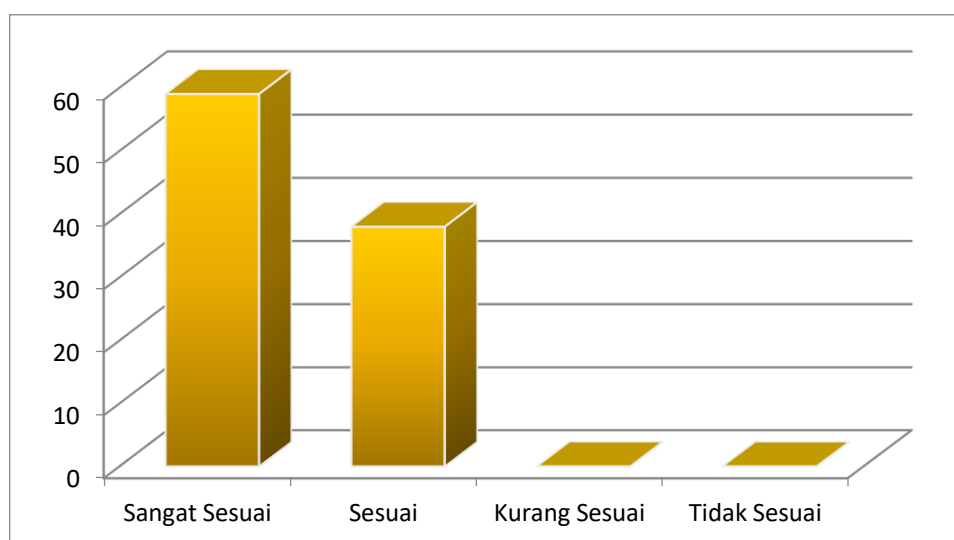
6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,608 berada pada interval skor 3,608 s/d 4,00, kategori **“Sangat Baik”**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan perizinan, pada unsurkompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini :

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			Frekwensi	%
1	Sangat Sesuai	4	59	62.5
2	Sesuai	3	38	38.5
3	Kurang Sesuai	2	0	0
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			97	101

Tabel 13. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Kompetensi Pelaksana Semester I Tahun 2022.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



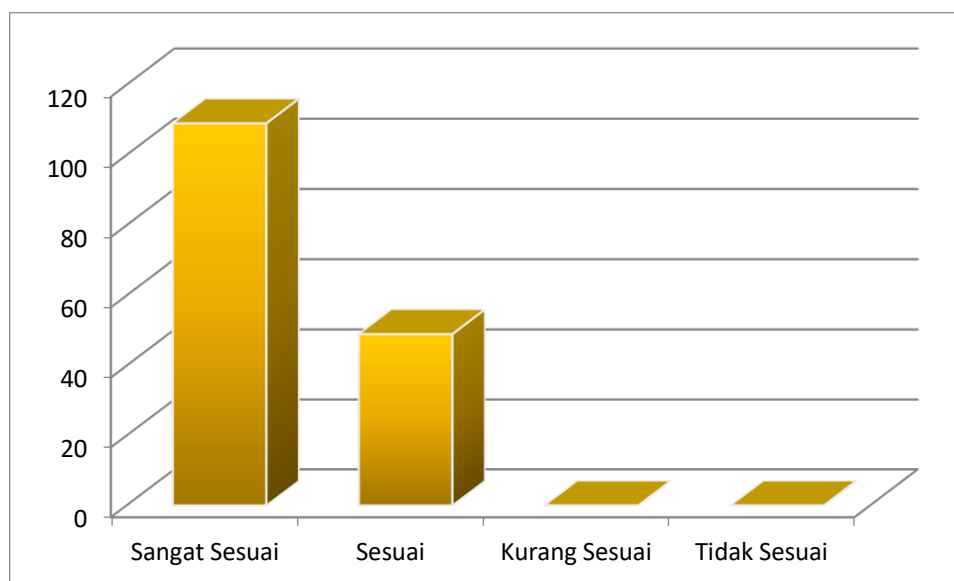
Gambar 11. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Kompetensi Pelaksana Semester I Tahun 2022

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,690 berada pada interval skor 3,690 s/d 4,00, kategori **“Sangat Baik”**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan perizinan, pada unsurkompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini :

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			Frekwensi	%
1	Sangat Sesuai	4	109	100.2
2	Sesuai	3	49	38.5
3	Kurang Sesuai	2	0	0
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			158	138.7

Tabel 14. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Kompetensi Pelaksana Semester II Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Gambar 12. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Kompetensi Pelaksana Semester II Tahun 2022

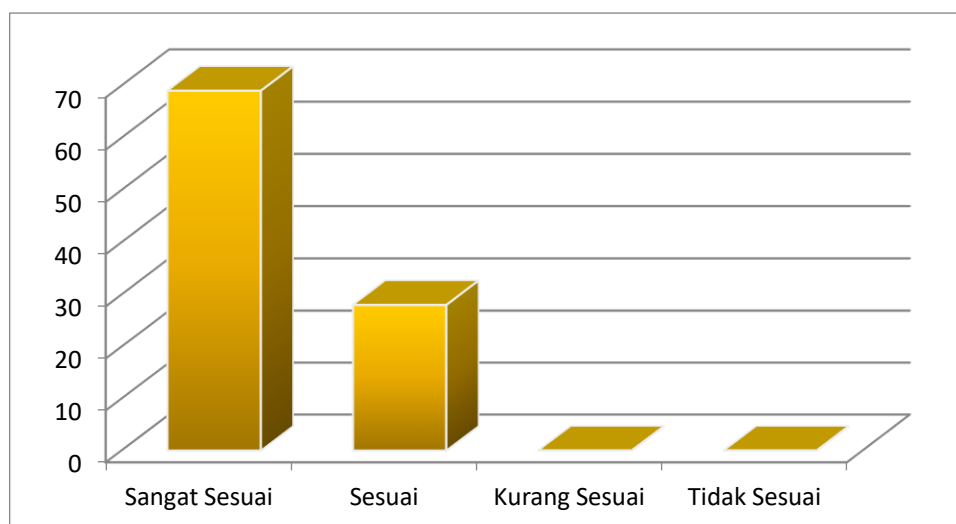
7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,711 berada pada interval skor 3,711 s/d 4,00, dengan kinerja unit pelayanan **“Sangat Baik”**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan perizinan pada perilaku pelaksana disajikan pada tabel berikut ini :

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			Frekwensi	%
1	Sangat Sesuai	4	69	70.5
2	Sesuai	3	28	30.5
3	Kurang Sesuai	2	0	0
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			97	101

Tabel 15. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Perilaku Pelaksana Semester I Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



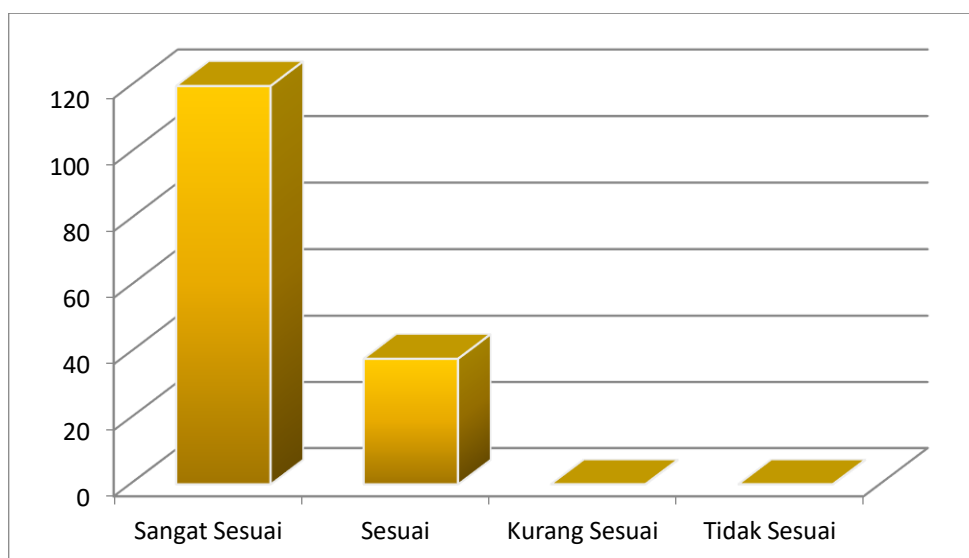
Gambar 16. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Perilaku Pelaksana Semester I Tahun 2022

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,759 berada pada interval skor 3,759 s/d 4,00, dengan kinerja unit pelayanan **“Sangat Baik”**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan perizinan pada perilaku pelaksana disajikan pada tabel berikut ini :

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			Frekwensi	%
1	Sangat Sesuai	4	120	100.5
2	Sesuai	3	38	30.5
3	Kurang Sesuai	2	0	0
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			158	131

Tabel 17. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Perilaku Pelaksana Semester II Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Gambar 13. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Perilaku Pelaksana Semester II Tahun 2022

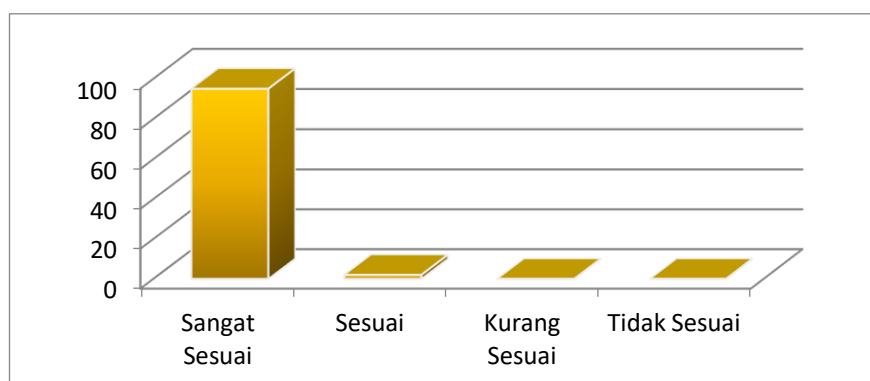
8. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,588 berada pada interval skor 3,588 s/d 4,00, dengan kinerja unit pelayanan **“Sangat Baik”**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan perizinan pada sarana dan prasarana disajikan pada tabel berikut ini :

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			Frekwensi	%
1	Sangat Sesuai	4	57	60.5
2	Sesuai	3	40	40.5
3	Kurang Sesuai	2	0	0
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			97	101

Tabel 19. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana Semester I Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



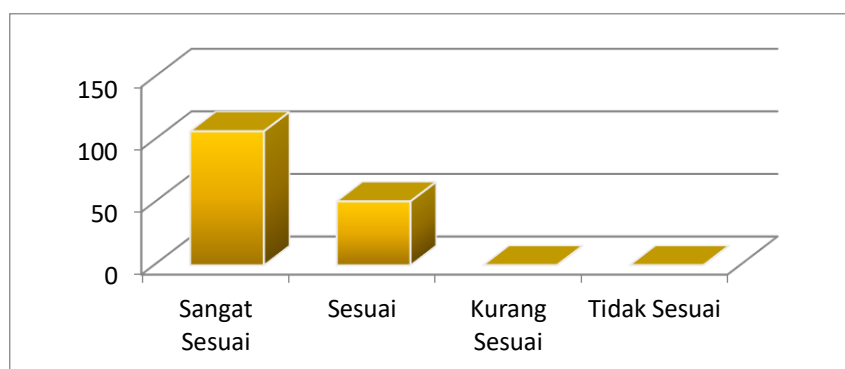
Gambar 19. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana Semester I Tahun 2022

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,677 berada pada interval skor 3,677 s/d 4,00, dengan kinerja unit pelayanan **“Sangat Baik”**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan perizinan pada sarana dan prasarana disajikan pada tabel berikut ini :

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			Frekwensi	%
1	Sangat Sesuai	4	107	100.1
2	Sesuai	3	51	50
3	Kurang Sesuai	2	0	0
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			158	150.1

Tabel 20. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana Semester II Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Gambar 20. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Sarana dan Prasarana Semester II Tahun 2022

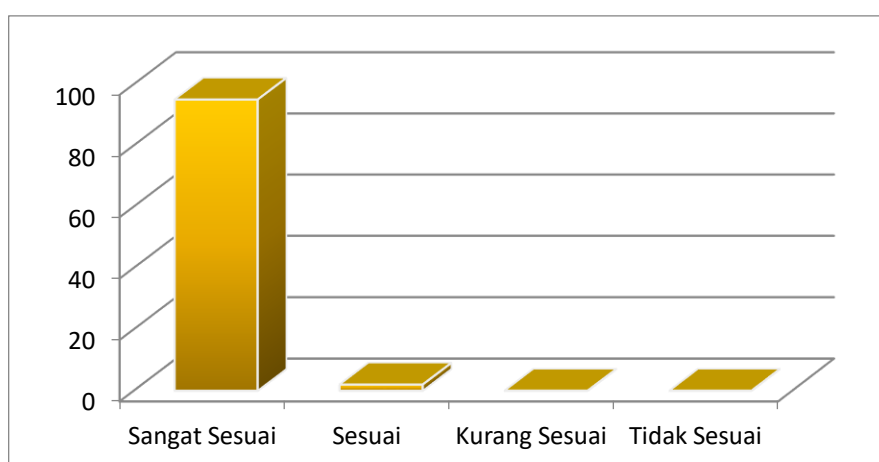
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata skor sebesar 3,379 berada pada interval skor 3,979 s/d 4,00, dengan kinerja unit pelayanan **“Sangat Baik”**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan perizinan pada penanganan pengaduan, saran dan masukan disajikan pada tabel berikut ini :

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			Frekwensi	%
1	Sangat Sesuai	4	95	95.5
2	Sesuai	3	2	20.5
3	Kurang Sesuai	2	0	0
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			97	116

Tabel 21. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Semester I Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini



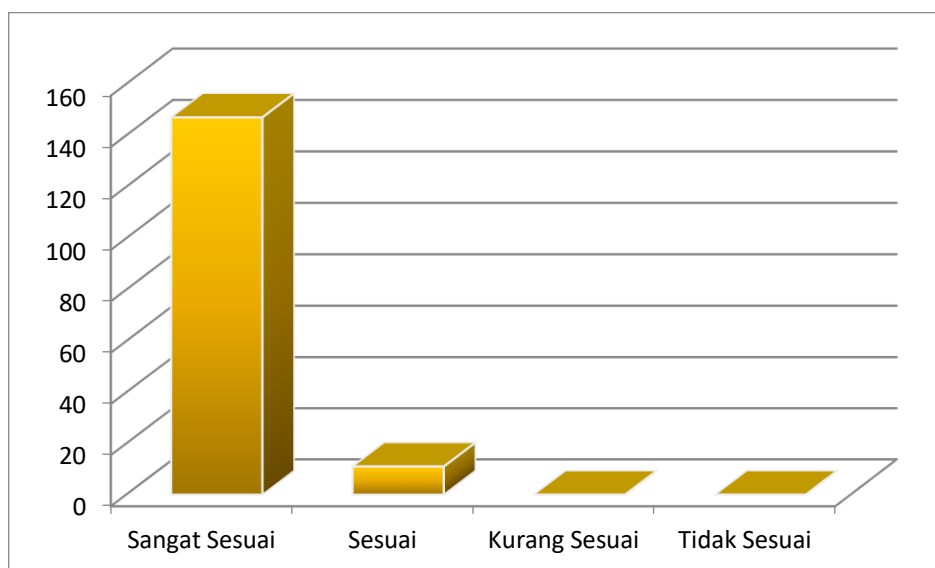
Gambar 21. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Semester I Tahun 2022.

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata skor sebesar 3,930 berada pada interval skor 3,930 s/d 4,00, dengan kinerja unit pelayanan **“Sangat Baik”**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan perizinan pada penanganan pengaduan, saran dan masukan disajikan pada tabel berikut ini :

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			Frekwensi	%
1	Sangat Sesuai	4	147	100.2
2	Sesuai	3	11	10.1
3	Kurang Sesuai	2	0	0
4	Tidak Sesuai	1	0	0
Jumlah			158	110.3

Tabel 22. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Semester II Tahun 2022.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini



Gambar 22. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Semester II Tahun 2022.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN SEMESTER I TAHUN 2022

NILAI IKM	PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
91,572	<p>RESPONDEN</p> <p>JUMLAH : 97 orang</p> <p>JENIS KELAMIN : L = 29 orang P = 68 orang</p> <p>PENDIDIKAN : SD = 0 orang SMP = 0 orang SMA = 16 orang DIII = 42 orang S1 = 39 orang S2 = 0 orang S3 = 0 orang</p> <p>Periode Survei = (05 Januari 2022) s/d (30 Juni 2022)</p>

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN SEMESTER I DAN II TAHUN 2022

NILAI IKM	PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
93,187	<p>RESPONDEN</p> <p>JUMLAH : 158 orang</p> <p>JENIS KELAMIN : L = 48 orang P = 110 orang</p> <p>PENDIDIKAN : SD = 0 orang SMP = 0 orang SMA = 16 orang DIII = 42 orang S1 = 39 orang S2 = 0 orang S3 = 0 orang</p> <p>Periode Survei = (01 Juli 2022) s/d (31 Desember 2022)</p>

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Berdasarkan hasil pengukuran yang terlihat pada Tabel 4 di atas, diketahui bahwa Nilai Survei IKM pada DPMPTSP Kabupaten Nias Selatan Semester I dan II Tahun 2022 ini adalah sebesar **93,187** dengan kinerja unit pelayanan "**Sangat Baik**", mutu pelayanan DPMPTSP Kabupaten Nias Selatan masuk kategori "**A**". Nilai ini meningkat **2.2 %** dari nilai IKM Semester II tahun 2021, yaitu **91,04**.

No.	Unsur Pelayanan	Perbandingan Nilai Rata-rata		Selisih (+/-)
		Semester I 2022	Semester II 2022	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
U1	Persyaratan Pelayanan	9.582	10.025	0,443
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	10.149	10.356	0,207
U3	Waktu Penyelesaian	9.809	10.199	0,390
U4	Biaya/Tarif	10.972	10.913	0,59
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	10.121	10.286	0,165
U6	Kompetensi Pelaksana	9.923	10.147	0,224
U7	Perilaku Pelaksana	10.206	10.339	0,133
U8	Sarana dan Prasarana	9.866	10.112	0.246
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	10.943	10.809	-0,134
TOTAL NILAI		91.572	93.187	2.001

Tabel 14. Perbandingan Nilai Survei IKM Semester I Tahun 2022 dengan Semester II Tahun 2022 per Unsur Pelayanan

Berdasarkan hasil pengukuran Tabel 14 terhadap 9 unsur pelayanan, diperoleh bahwa beberapa unsur pelayanan mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Persyaratan Pelayanan (U1) dengan nilai rata-rata persepsi sebesar 3,646 atau mutu pelayanan "A", mengalami Kenaikan 0,443.

- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2) dengan nilai rata-rata persepsi sebesar 3,766 atau mutu pelayanan “A”, mengalami peningkatan 0,207.
- 3) Waktu Penyelesaian(U3) dengan nilai rata-rata persepsi sebesar 3,709 atau mutu pelayanan “A”, mengalami peningkatan 0,390.
- 4) Biaya/ Tarif (U4) dengan nilai rata-rata persepsi sebesar 3.968 atau mutu pelayanan “A”, mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan 0,59.
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5) dengan nilai rata-rata sebesar 3,742 atau mutu pelayanan “A”, mengalami peningkatan 0,165.
- 6) Kompetensi Pelaksana(U6) dengan nilai rata-rata persepsi sebesar 3,690 atau mutu pelayanan “A”, mengalami Peningkatan 0,244.
- 7) Perilaku Pelaksana (U7) dengan nilai rata-rata persepsi sebesar 3,759 atau mutu pelayanan “A”, mengalami Peningkatan sebesar 0,133.
- 8) Sarana dan Prasarana (U8) dengan nilai rata-rata persepsi sebesar 3,677 atau mutu pelayanan “A” mengalami Peningkatan sebesar 0,246.
- 9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9) dengan nilai rata-rata persepsi 3.930 atau mutu pelayanan “A”, mengalami Penurunan sebesar -0,134.

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata	Nilai Interval Konversi	Persentase Nilai Survei IKM	Mutu Pelayanan per Unsur
1	2	3	4	5	6
U1	Persyaratan pelayanan	3.646	0.401	10.025	A
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3.766	0.414	10.356	A
U3	Waktu penyelesaian	3.709	0.408	10.199	A
U4	Biaya/Tarif	3.968	0.437	10.913	A

U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.741	0.411	10.286	A
U6	Kompetensi Pelaksana	3.690	0.406	10.147	A
U7	Perilaku Pelaksana	3.759	0.414	10.339	A
U8	Sarana dan Prasarana	3.677	0.404	10.112	A
U9	Penanganan Pengaduan	3.930	0.432	10.809	A

Tabel 15. Persentase Nilai Survei IKM per Unsur Pelayanan

Dari 9 unsur yang dinilai pada Tabel 15, unsur Biaya/Tarif (U4) dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9) mendapat nilai tertinggi dibanding dengan unsur yang lain dengan capaian nilai sebesar 10.913 dan 10.809. Hal ini menunjukkan bahwa pengurusan perizinan tidak ada dipungut biaya sepeser pun dan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat dapat dijalankan dengan sangat baik oleh DPMPPTSP Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) yang berlaku sedangkan unsur-unsur yang lain juga mendapatkan nilai sangat baik dari pemohon.

2. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat

A. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Kesempatan dan kemudahan–kemudahan bagi penanam modal, baik modal domestic maupun modal asing antara lain bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja. Sehubungan dengan tujuan untuk memperluas kesempatan kerja, sampai saat ini masih adanya anggapan bahwa penanaman modal asing secara garis besar akan lebih bersifat padat modal, sedangkan

penanaman modal dalam negeri secara garis besar akan lebih bersifat padat karya.

Dengan demikian dari sudut pandangan tersebut dapatlah diduga bahwa ada perbedaan daya serap tenaga kerja antara penanaman modal dalam rangka kemudahan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan penanaman modal dalam rangka kemudahan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Berikut ini adalah data Rasio Daya Tenaga Kerja Tenaga dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 :

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Tenaga Kerja bekerja pada perusahaan	24	24	54	14.810	6.217
2.	Jumlah Seluruh PMA/PMDN	8	8	18	7.443	1.859
	Jumlah Rasio	0,33	0,33	0,33	2,0	3,0

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa Tahun 2018 - 2020 jumlah Rasio Daya Tenaga Kerja Tenaga berjumlah 0,33, Tahun 2021 Rasio Daya Tenaga Kerja Tenaga berjumlah 2,0, Tahun 2022 Rasio Daya Tenaga Kerja Tenaga berjumlah 3,0. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan daya serap tenaga kerja sampai dengan Tahun 2022, dimana pada Tahun 2022 setiap perusahaan (PMA/PMD) menyerap 3 orang tenaga kerja.

B. Persentase Penerbitan Izin yang diajukan oleh pelaku usaha

1. Tersedianya Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu dan Cepat Untuk Mempermudah Investasi

Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) memiliki Standard Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan non Perizinan dalam berbagai bidang, antara lain : Bidang Penanaman Modal, Pertanahan, Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kebudayaan, Perikanan dan Kelautan, Komunilasi dan Informatika, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pariwisata, Pertanian, perkebunan dan peternakan, Industri dan Perdagangan, ESDM dan Listrik, dan Kehutanan.

2. Perda Tentang Prioritas Kawasan Investasi

Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) belum memiliki Peraturan Daerah tentang prioritas kawasan investasi disebabkan oleh beberapa faktor dan kendala dalam pembuatan peta potensi investasi di Wilayah Kabupaten Nias Selatan yang memerlukan perencanaan yang matang.

3. Keputusan Bupati Tentang Pendelegasian Wewenang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) memiliki Surat Keputusan Bupati Tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) untuk melaksanakan kegiatan perizinan dan non perizinan.

4. Jumlah Investasi Usaha Berskala Nasional (PMDN)

Berdasarkan tabel capaian Indikator kinerja tahun 2022 diatas, maka menunjukkan bahwa jumlah investor berskala Nasional (PMDN) tahun 2022 mencapai 1.858 (seribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) yang izin usahanya diterbitkan melalui layanan online (OSS) dengan nilai Rp. 482.739.720.705 (Empat ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh

sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima rupiah).

5. Jumlah Izin Usaha IRT dan UKM Melalui Layanan Perizinan Online (OSS)

Pada tahun 2022 jumlah izin usaha yang diterbitkan melalui layanan OSS berjumlah 1.858 (seribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), dan seluruhnya tergolong PMDN.

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator	Target capaian TA. 2020	Realisasi	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	100 %	99,56%	
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Dok	1 Dok	
3	Program Promosi Penanaman Modal	1 Dok	1 Dok	
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	1 Dok	1 Dok	
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1 Dok	1 Dok	

3.2. ANALISIS REALISASI KINERJA

Pengukuran Kinerja kegiatan untuk mengetahui tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dilihat dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :

a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 capaian kinerja dari indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memperoleh nilai sebesar 76,55 dari nilai maksimal 100, dan tergolong kategori B.

b. Rasio daya serap tenaga kerja

- Target : 3 % / Rasio (jln tenaga kerja : jln PMDN/PMA)
- Capaian : Pada tahun 2022 jumlah tenaga kerja dari 1.858 (Seribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) perusahaan adalah 6.217 orang, jadi capaian rasio daya serap tenaga kerja adalah 3.

Dari uraian diatas menggambarkan bahwa capaian kinerja adalah 100 % dari target. Hal ini disebabkan karena dari 1.858 PMDN memiliki 3 orang tenaga kerja masing – masing perusahaan. Jadi jumlah keseluruhan tenaga kerja dari 1.858 PMDN adalah sebanyak 6.217 orang.

c. Perda Tentang Prioritas Kawasan Investasi

- i. Target : 1 Dok
- ii. Capaian : Pada tahun 2022 Perda Tentang Prioritas Kawasan Investasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh beberapa faktor dan kendala dalam pembuatan peta potensi investasi di Wilayah Kabupaten Nias Selatan yang memerlukan perencanaan yang matang.

d. Keputusan Bupati Tentang Pendelegasian Wewenang

- i. Target : 1 Dok
- ii. Capaian : Pada tahun 2022 jumlah dokumen Keputusan Bupati Tentang Pendelegasian Wewenang yang diterbitkan pada DPMPPTSP sebanyak 1 dokumen.

e. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Tahun 2022

- i. Target : 3 (tiga) Investor baru (PMDN/PMA)
- ii. Capaian : Pada tahun 2022 jumlah investor baru di Nias

Selatan sebanyak 1.858 (Seribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) investor, seluruhnya tergolong PMDN.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2022 mengalami penurunan dibanding capaian tahun 2021 yaitu dari 246,83%. menjadi 134,00%. dari 3 (tiga) investor yang ditargetkan tahun 2022 menjadi 1.858 (Seribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah). Namun disisi lain jumlah modal yang di investasikan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, dimana pada tahun 2021 modal usaha sebesar Rp. 206.054.110.109 (Dua ratus enam milyar lima puluh empat juta seratus sepuluh ribu seratus Sembilan rupiah), dan pada tahun 2022 jumlah modal usaha mencapai Rp. 482.739.720.705 (Empat ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima rupiah). Dari uraian diatas menggambarkan bahwa jumlah Investor dan PMDN yang menanamkan modalnya lebih tinggi pada tahun 2021, sedangkan dari segi nilai modal yang di investasikan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan bahkan mencapai dua kali lipat dibanding dengan tahun 2021. keberhasilan dalam mendatangkan investor yang disebabkan oleh pelayanan yang cepat dengan sistem online (OSS) dan singkat sesuai dengan kapasitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP).

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) baru sbb:

Capaian : Pada tahun 2022 nilai investasi dari 1.858 investor baru PMDN sebesar Rp. 482.739.720.705,- atau \$ 32.182.648,047,- (Kurs Rp.15.000,-)

- f. Jumlah Izin Usaha IRT dan UKM Melalui Layanan Perizinan Online (OSS)
 - i. Target : 1000 (seribu) dokumen
 - ii. Capaian : Pada tahun 2022 jumlah izin baru yang diterbitkan

di Nias Selatan sebanyak 1.858 (Seribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), seluruhnya tergolong PMDN.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2022 sebesar 134%.

Apabila dibandingkan jumlah izin yang diterbitkan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 7.405 izin dengan jumlah izin pada tahun 2022 yang mencapai 1.858 izin

3.4. KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan termasuk salah satu perangkat daerah yang seharusnya dapat menyumbangkan kas daerah, tetapi perangkat hukum atau dasar hukum untuk melakukan pungutan sumbangan bagi kas daerah (retribusi daerah), hanya terdapat satu produk hukum yang dapat digunakan yakni Peraturan daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tertentu. Sementara dalam pengurusan dan/ atau penerbitan izin usaha yang lain gratis atau sehingga pemasukan terhadap kas daerah tidaklah setara atau tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka proses penerbitan izin. Dalam hal ini, sangatlah diperlukan pemungutan terhadap penerbitan setiap izin, sebagai dispensasi atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mendukung dan menyokong pendapatan daerah.

Dari uraian tersebut dapat ditarik gambaran bahwa Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan khususnya dalam rangka memberikan sumbangan pendapatan daerah, mengalami beberapa permasalahan yang kadang menjadi kendala dalam melakukan proses penerbitan izin, hal ini juga telah ditentukan dalam uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan, antara lain :

1. Kurangnya perangkat hukum (produk hukum Kabupaten Nias Selatan : Perda maupun Perbup) dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non perizinan;
2. Kurangnya koordinasi antara lembaga teknis daerah dalam hal pemberian rekomendasi layak tidaknya izin yang dimohonkan untuk diproses dan diterbitkan izin-nya oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Nias Selatan;
3. Minimnya perangkat teknis perizinan dan sub perizinan dalam menunjang pelayanan publik.

Lazimnya pada setiap permasalahan-permasalahan pemerintahan, sesungguhnya harus ditangani dan diselesaikan dengan segera selaras dengan prinsip pelayanan masyarakat yaitu pelayanan cepat, tepat, dan dengan biaya yang murah.

Ketidaklengkapan “perangkat lunak” pelayanan masyarakat khususnya dalam pelayanan perizinan dan non perizinan akan berdampak terhadap :

1. Umum : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan atau sumber keuangan daerah seharusnya mampu menyumbangkan masukan keuangan kepada daerah sehingga diharapkan (minimal) seluruh anggaran pengeluaran OPD (dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan) dapat tertutupi.
2. Khusus : kurangnya “perangkat hukum” terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan, akan menimbulkan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dalam setiap menyelenggarakan kegiatan “terkesan” menghabiskan

keuangan daerah tanpa mampu memberikan atau menyumbangkan masukan ke kas daerah;

- b. Masyarakat selalu menaruh curiga bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dalam melakukan pelayanan izin, terutama klien yang pada dasarnya diwajibkan memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu sehingga “terkesan mempersulit”.

Dalam rangka penghapusan tindak pidana korupsi serta dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat yang baik, optimal, efisien, efektif, transparan, dan dengan biaya yang murah, sudah selayaknya jika keseluruhan perangkat hukum kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan (sebagai salah satu sokongan dan dukungan pendapatan daerah) harus diterbitkan sesegera mungkin.

3.5. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pegawai Negeri Sipil pada DPMPPTSP Kabupaten Nias Selatan berjumlah 22 (dua puluh dua) orang. Rekapitulasi PNS pada DPMPPTSP Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Pendidikan, Golongan Ruang dan Eselon/ yang disetarakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Jabatan	Jlh	Pendidikan				Golongan			Eselon			
			S.2	S.1	D.3	SLTA	IV	III	II	II	III	IV	Non
1	2	3	4				5			6			
1	Kepala Dinas	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
2	Sekretaris	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
3	Kepala Bidang	4	1	2	-	-	1	3	-	-	4	-	-
4	Kasubbag/Kasi	12	5	8	1	-	-	13	-	-	-	12	-
5	Pelaksana	4	-	1	-	2	-	1	2	-	-	-	4
Jumlah Keseluruhan		22	8	11	1	2	3	17	2	1	5	12	4
			22				22			22			

Seluruh tenaga sumber daya manusia yang bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan telah memberikan kontribusi maksimal untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan secara efektif dan efisien.

3.6. PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Penerapan kebijakan dan rencana strategi dalam pencapaian kinerja yang baik dalam pelayanan publik khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan tidak terlepas dari perjalanan panjang pencapaian kinerja pemerintah yang objektif dan sangat erat kaitannya dengan hasil yang dapat dicapai dari hasil penerapan tersebut. Visi dan Misi yang jelas dapat mewujudkan pelayanan yang optimal dan memuaskan melalui nilai budaya, transparansi dan kepastian hukum serta kepentingan publik. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan layanan publik dengan pemanfaatan sistem informasi manajemen perizinan dan teknologi informasi telah memperketat pengawasan, pengendalian dan pengembangan nilai indeks kepuasan masyarakat akan pelayanan publik itu sendiri. Dari beberapa kategori, tinjauan umum keberhasilan daripada kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan yaitu sebagai berikut :

1. Terpenuhinya pelayanan yang transparan dengan sumber informasi yang mudah didapatkan;
2. Tersedianya pelayanan yang cepat dan singkat sesuai dengan kapasitas Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Nias Selatan sebagai unit pelayanan terpadu satu pintu;
3. Terciptanya dunia usaha yang kooperatif dan kompetitif yang disertai dengan pengawasan yang berkelanjutan;
4. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan izin usaha;

5. Meningkatnya investor asing yang datang dari luar untuk mengambil bagian dalam membangun dunia usaha dengan keyakinan dan harapan kerjasama yang baik dan mudah didapatkan dalam berinvestasi di dunia usaha;
6. Meningkatnya ekonomi masyarakat kecil dalam membangun dunia usaha.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan pada Tahun Anggaran 2022, yaitu :

- b. Target pendapatan untuk Tahun 2022 adalah Rp. 30.000.000,- terdiri dari Retribusi IMB Rp. 20.000.000,- dan Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol Rp. 10.000.000,-. Realisasi pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp. 13.859.625,- atau sebesar 46,19% dari target, disebabkan karena capaian pendapatan hanya berasal dari retribusi IMB. Bila dibandingkan realisasi pendapatan TA. 2021 sebesar Rp. 18.984.630,- maka terjadi penurunan realisasi pendapatan sebesar Rp. 5.125.000.
- c. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tahun 2021

No	Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih/ kurang (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.534.699.304	1.472.164.486	62.534.818	95,93
2	Belanja Operasi	2.633.680.704	2.415.326.476	218.354.228	91,71
	<i>a. Belanja Pegawai</i>	1.534.699.304	1.472.164.486	62.534.818	95,93
	<i>b. Belanja Barang dan Jasa</i>	1.098.981.400	943.161.990	155.819.410	85,82
3	Belanja Modal	0	0	0	0

Jumlah	2.633.680.704	2.415.326.476	218.354.228	91,71
---------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------

Tahun 2022

No	Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih/ kurang (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	61.520.000	57.120.000	4.400.000	92,85
2	Belanja Operasi	1.030.706.350	1.029.968.428	737.922	99,93
	<i>a. Belanja Pegawai</i>				
	<i>b. Belanja Barang dan Jasa</i>	1.030.706.350	1.029.968.428	737.922	99,93
3	Belanja Modal	79.448.565	79.448.565	0	100
	Jumlah	1.171.674.915	1.166.536.993	5.137.922	99,56

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan kebijakan dan rencana strategi dalam pencapaian kinerja yang baik dalam pelayanan publik khususnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan tidak terlepas dari perjalanan panjang pencapaian kinerja pemerintah yang objektif dan sangat erat kaitannya dengan hasil yang dapat dicapai dari hasil penerapan tersebut. Visi dan Misi yang jelas dapat mewujudkan pelayanan yang optimal dan memuaskan melalui nilai budaya, transparansi dan kepastian hukum serta kepentingan publik. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan layanan publik dengan pemanfaatan sistem informasi manajemen perizinan dan teknologi informasi telah memperketat pengawasan, pengendalian dan pengembangan nilai indeks kepuasan masyarakat akan pelayanan publik itu sendiri. Dari beberapa kategori, tinjauan umum keberhasilan daripada kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan yaitu sebagai berikut :

1. Terpenuhinya pelayanan yang transparan dengan sumber informasi yang mudah didapatkan;
2. Tersedianya pelayanan yang cepat dan singkat sesuai dengan kapasitas Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Nias Selatan sebagai unit pelayanan terpadu satu pintu;
3. Terciptanya dunia usaha yang kooperatif dan kompetitif yang disertai dengan pengawasan yang berkelanjutan;
4. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan izin usaha;
5. Meningkatnya investor asing yang datang dari luar untuk mengambil bagian dalam membangun dunia usaha dengan

keyakinan dan harapan kerjasama yang baik dan mudah didapatkan dalam berinvestasi di dunia usaha;

6. Meningkatnya ekonomi masyarakat kecil dalam membangun dunia usaha.

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan termasuk salah satu perangkat daerah yang seharusnya dapat menyumbangkan kas daerah, tetapi perangkat hukum atau dasar hukum untuk melakukan pungutan sumbangan bagi kas daerah (retribusi daerah), hanya terdapat satu produk hukum yang dapat digunakan yakni Peraturan daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tertentu. Sementara dalam pengurusan dan/ atau penerbitan izin usaha yang lain gratis atau sehingga pemasukan terhadap kas daerah tidaklah setara atau tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka proses penerbitan izin. Dalam hal ini, sangatlah diperlukan pemungutan terhadap penerbitan setiap izin, sebagai dispensasi atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mendukung dan menyokong pendapatan daerah.

Dari uraian tersebut dapat ditarik gambaran bahwa Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan khususnya dalam rangka memberikan sumbangan pendapatan daerah, mengalami beberapa permasalahan yang kadang menjadi kendala dalam melakukan proses penerbitan izin, hal ini juga telah ditentukan dalam uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan, antara lain :

1. Kurangnya perangkat hukum (produk hukum Kabupaten Nias Selatan : Perda maupun Perbup) dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non perizinan;

2. Kurangnya koordinasi antara lembaga teknis daerah dalam hal pemberian rekomendasi layak tidaknya izin yang dimohonkan untuk diproses dan diterbitkan izin-nya oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Nias Selatan;
3. Minimnya perangkat teknis perizinan dan sub perizinan dalam menunjang pelayanan publik.

Ketidaklengkapan “perangkat lunak” pelayanan masyarakat khususnya dalam pelayanan perizinan dan non perizinan akan berdampak terhadap :

1. Umum : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan atau sumber keuangan daerah seharusnya mampu menyumbangkan masukan keuangan kepada daerah sehingga diharapkan (minimal) seluruh anggaran pengeluaran OPD (dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan) dapat tertutupi.
2. Khusus : kurangnya “perangkat hukum” terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan, akan menimbulkan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dalam setiap menyelenggarakan kegiatan “terkesan” menghabiskan keuaangan daerah tanpa mampu memberikan atau menyumbangkan masukan ke kas daerah;
 - b. Masyarakat selalu menaruh curiga bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan dalam melakukan pelayanan izin, terutama klien yang pada dasarnya diwajibkan memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu sehingga “terkesan mempersulit”.

Dalam rangka penghapusan tindak pidana korupsi serta dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat yang baik, optimal, efisien, efektif, transparan, dan dengan biaya yang murah, sudah selayaknya

jika keseluruhan perangkat hukum kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan (sebagai salah satu sokongan dan dukungan pendapatan daerah) harus diterbitkan sesegera mungkin.

B. Saran

Dari keseluruhan uraian diatas, beberapa usulan yang seharusnya dimunculkan ke permukaan dalam rangka menyelesaikan dan solusi cepat dan tepat dalam pemecahannya, sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan daerah melalui pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan;
2. Pembuatan dasar hukum penerbitan setiap izin usaha yang didelegasikan;
3. Meningkatkan transparansi informasi kepada publik agar dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat secara luas khususnya di Nias Selatan dan Indonesia secara umum dengan membuat "Website" Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan;
4. Menjalinkan kerjasama dengan dunia usaha sebagai partnership dalam memudahkan pengawasan terhadap dunia usaha yang ada di Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Tabel T-C.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi						
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik				LAKIP	C	B		B		B		B		B		B		B		DPMPTSP	DPH-PTSP			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di PTSP				IKM	C	B		B		B		B		B		B		B		DPMPTSP	DPH-PTSP			
		2	18	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
		2	18	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dok	7 Dok	Rp 30,000,000	7 Dok	Rp 31,900,000	7 Dok	Rp 33,075,000	7 Dok	Rp 34,728,750	7 Dok	Rp 36,465,188	35 Dok	Rp 165,766,938	DPMPTSP	DPH-PTSP			
		2	18	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	Rp 7,500,000	4 Dok	Rp 7,875,000	4 Dok	Rp 8,268,750	4 Dok	Rp 8,662,188	4 Dok	Rp 9,116,297	20 Dok	Rp 41,442,234	DPMPTSP	DPH-PTSP	
		2	18	1	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terwujudnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	Rp 7,500,000	1 Dok	Rp 7,875,000	1 Dok	Rp 8,268,750	1 Dok	Rp 8,662,188	1 Dok	Rp 9,116,297	5 Dok	Rp 41,442,234	DPMPTSP	DPH-PTSP	
		2	18	1	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terwujudnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	DPMPTSP	DPH-PTSP	
		2	18	1	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terwujudnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	Rp 7,500,000	1 Dok	Rp 7,875,000	1 Dok	Rp 8,268,750	1 Dok	Rp 8,662,188	1 Dok	Rp 9,116,297	5 Dok	Rp 41,442,234	DPMPTSP	DPH-PTSP	
		2	18	1	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terwujudnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	DPMPTSP	DPH-PTSP	
		2	18	1	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Lap	Rp -	Lap	Rp -	Lap	Rp -	Lap	Rp -	Lap	Rp -	Lap	Rp -	DPMPTSP	DPH-PTSP		
		2	18	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	1 Lap	Rp 7,500,000	1 Dok	Rp 7,875,000	1 Dok	Rp 8,268,750	1 Dok	Rp 8,662,188	1 Dok	Rp 9,116,297	5 Dok	Rp 41,442,234	DPMPTSP	DPH-PTSP	
		2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	19 Dok	19 Dok	Rp 1,654,745,787	19 Dok	Rp 1,983,444,944	19 Dok	Rp 2,377,771,433	19 Dok	Rp 2,850,845,084	19 Dok	Rp 3,418,406,457	95 Dok	Rp 12,285,216,714	DPMPTSP	DPH-PTSP	
		2	18	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bin	12 Bin	Rp 1,639,745,787	12 Bin	Rp 1,967,694,944	12 Bin	Rp 2,361,233,933	12 Bin	Rp 2,833,480,719	12 Bin	Rp 3,400,178,863	70 Bin	Rp 12,202,332,246	DPMPTSP	DPH-PTSP	
		2	18	1	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	DPMPTSP	DPH-PTSP
		2	18	1	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	DPMPTSP	DPH-PTSP
		2	18	1	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	DPMPTSP	DPH-PTSP
		2	18	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	Rp 7,500,000	1 Dok	Rp 7,875,000	1 Dok	Rp 8,268,750	1 Dok	Rp 8,662,188	1 Dok	Rp 9,116,297	5 Dok	Rp 41,442,234	DPMPTSP	DPH-PTSP	
		2	18	1	2.02	06	Pengelolaan dan Penyelesaian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terwujudnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	Dok	Rp -	DPMPTSP	DPH-PTSP
		2	18	1	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Bulanan SKPD	Terwujudnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Lap	12 Lap	Rp 7,500,000	12 Lap	Rp 7,875,000	12 Lap	Rp 8,268,750	12 Lap	Rp 8,662,188	12 Lap	Rp 9,116,297	20 Lap	Rp 41,442,234	DPMPTSP	DPH-PTSP	

	2	18	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	Rp	2,400,000	1 Lap	Rp	2,640,000	1 Lap	Rp	2,904,000	1 Lap	Rp	3,194,400	1 Lap	Rp	3,513,840	60 Bln	Rp	14,652,240	DPMPPTSP	DPM-PTTSP	
	2	18	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Teradanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Lap	Rp	2,500,000	1 Lap	Rp	2,875,000	1 Lap	Rp	3,309,250	1 Lap	Rp	3,638,875	1 Lap	Rp	4,000,563	60 Bln	Rp	16,318,688	DPMPPTSP	DPM-PTTSP	
	2	18	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Teradanya Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	1 Lap	Rp	-	1 Lap	Rp	-	1 Lap	Rp	-	1 Lap	Rp	-	1 Lap	Rp	-	12 Bln	Rp	-	DPMPPTSP	DPM-PTTSP	
	2	18	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Teradanya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Lap	Rp	234,000,000	12 Lap	Rp	257,400,000	12 Lap	Rp	283,140,000	12 Lap	Rp	311,454,000	12 Lap	Rp	342,599,400	60 Bln	Rp	1,428,593,400	DPMPPTSP	DPM-PTTSP	
	2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uraan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	8 Unit	Rp	86,000,000	8 Unit	Rp	83,800,000	5 Unit	Rp	70,180,000	5 Unit	Rp	77,198,000	5 Unit	Rp	84,517,500	100%	Rp	354,095,800	DPMPPTSP	DPM-PTTSP	
	2	18	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Teradanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	Rp	50,000,000	4 Unit	Rp	55,000,000	4 Unit	Rp	60,500,000	4 Unit	Rp	66,550,000	4 Unit	Rp	73,205,000	60 Bln	Rp	305,255,000	DPMPPTSP	DPM-PTTSP	
	2	18	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Teradanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	Rp	-	Unit	Rp	-	Unit	Rp	-	Unit	Rp	-	Unit	Rp	-	Unit	Rp	-	DPMPPTSP	DPM-PTTSP	
	2	18	1	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Unit	Rp	-	Unit	Rp	-	Unit	Rp	-	Unit	Rp	-	Unit	Rp	-	Unit	Rp	-	DPMPPTSP	DPM-PTTSP	
	2	18	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	Rp	-	1 Unit	Rp	-	1 Unit	Rp	-	1 Unit	Rp	-	1 Unit	Rp	-	1 Unit	Rp	-	DPMPPTSP	DPM-PTTSP	
	2	18	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	Rp	-	Unit	Rp	-	Unit	Rp	-	Unit	Rp	-	Unit	Rp	-	Unit	Rp	-	DPMPPTSP	DPM-PTTSP	
	2	18	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	Rp	8,000,000	12 Bln	Rp	8,800,000	12 Bln	Rp	9,680,000	12 Bln	Rp	10,648,000	12 Bln	Rp	11,712,800	60 Bln	Rp	48,940,800	DPMPPTSP	DPM-PTTSP	
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat							Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	3.3			3.5			3.5			3.5					3.5					DPMPPTSP	DPM-PTTSP
Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat							Persentase Permbtan Izin yang diajukan oleh pelaku usaha	100%			100%			100%			100%					100%					DPMPPTSP	DPM-PTTSP
	2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Nias Selatan	230%	100%	Rp	80,000,000	100%	Rp	85,000,000	100%	Rp	80,500,000	100%	Rp	86,550,000	100%	Rp	73,205,000	100%	Rp	305,255,000	DPMPPTSP	DPM-PTTSP
	2	18	2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas/insentif bidang penanaman modal	100%	Rp	-	100%	Rp	-	100%	Rp	-	100%	Rp	-	100%	Rp	-	100%	Rp	-			DPM-PTTSP
	2	18	2	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	12 Dok	Rp	-	12 Dok	Rp	-	12 Dok	Rp	-	12 Dok	Rp	-	12 Dok	Rp	-	12 Dok	Rp	-	DPMPPTSP	DPM-PTTSP	
	2	18	2	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	12 Kag Usaha	Rp	-	12 Kag Usaha	Rp	-	12 Kag Usaha	Rp	-	12 Kag Usaha	Rp	-	12 Kag Usaha	Rp	-	12 Kag Usaha	Rp	-	DPMPPTSP	DPM-PTTSP	
	2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi daerah investasi	2 Dok	Rp	50,000,000	2 Dok	Rp	55,000,000	2 Dok	Rp	60,500,000	2 Dok	Rp	66,550,000	2 Dok	Rp	73,205,000	2 Dok	Rp	305,255,000	DPMPPTSP	DPM-PTTSP	
	2	18	2	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	Rp	-	1 Dok	Rp	-	1 Dok	Rp	-	1 Dok	Rp	-	1 Dok	Rp	-	1 Dok	Rp	-	DPMPPTSP	DPM-PTTSP	
	2	18	2	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Teradanya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dok	Rp	50,000,000	1 Dok	Rp	55,000,000	1 Dok	Rp	60,500,000	1 Dok	Rp	66,550,000	1 Dok	Rp	73,205,000	1 Dok	Rp	305,255,000	DPMPPTSP	DPM-PTTSP	
	2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Nias Selatan	230%	100%	Rp	100,000,000	100%	Rp	125,000,000	100%	Rp	158,250,000	100%	Rp	171,875,000	100%	Rp	189,062,500	100%	Rp	742,187,500	DPMPPTSP	DPM-PTTSP
	2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang menjadi promosi penanaman modal	2 Dok	Rp	100,000,000	2 Dok	Rp	125,000,000	2 Dok	Rp	158,250,000	2 Dok	Rp	171,875,000	2 Dok	Rp	189,062,500	2 Dok	Rp	742,187,500	DPMPPTSP	DPM-PTTSP	
	2	18	3	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Teradanya Data Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Dok	Rp	50,000,000	1 Dok	Rp	62,500,000	1 Dok	Rp	78,125,000	1 Dok	Rp	85,937,500	1 Dok	Rp	94,531,250	1 Dok	Rp	371,093,750	DPMPPTSP	DPM-PTTSP	
	2	18	3	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota (PMA/PMDN)	1 Dok	Rp	50,000,000	1 Dok	Rp	62,500,000	1 Dok	Rp	78,125,000	1 Dok	Rp	85,937,500	1 Dok	Rp	94,531,250	1 Dok	Rp	371,093,750	DPMPPTSP	DPM-PTTSP	

2	18	4				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penerbitan pertizinan dan non pertizinan penanaman modal	8000	100%	Rp 100,000,000	100%	Rp 128,000,000	100%	Rp 188,250,000	100%	Rp 171,875,000	100%	Rp 188,062,800	100%	Rp 742,187,500	DPMPPTSP	DPH-PPTSP
2	18	4	2.01			Pelayanan Pertizinan dan Non Pertizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang diterbitkan secara online	8000	300 izin	Rp 100,000,000	300 izin	Rp 128,000,000	300 izin	Rp 188,250,000	300 izin	Rp 171,875,000	300 izin	Rp 188,062,800	1500 izin	Rp 742,187,500	DPMPPTSP	DPH-PPTSP
2	18	4	2.01	01		Persediaan Pelayanan Terpadu Pertizinan dan Non pertizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersejadinya Pelayanan Terpadu Pertizinan dan Non Pertizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	Rp 50,000,000	300 Pelaku Usaha	Rp 62,500,000	300 Pelaku Usaha	Rp 78,125,000	300 Pelaku Usaha	Rp 85,937,500	300 Pelaku Usaha	Rp 94,531,250	1500 Pelaku Usaha	Rp 371,093,750	DPMPPTSP	DPH-PPTSP
2	18	4	2.01	02		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Pertizinan dan Non Pertizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Pertizinan Berusaha dan Non Pertizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	Rp 50,000,000	300 Pelaku Usaha	Rp 62,500,000	300 Pelaku Usaha	Rp 78,125,000	300 Pelaku Usaha	Rp 85,937,500	300 Pelaku Usaha	Rp 94,531,250	100%	Rp 371,093,750	DPMPPTSP	DPH-PPTSP
2	18	4	2.01	03		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Pertizinan dan Non Pertizinan	Tersejadinya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Pertizinan dan Non Pertizinan	100 Orang	100 Orang	Rp -	100 Orang	Rp -	100 Orang	Rp -	100 Orang	Rp -	100 Orang	Rp -	100 Orang	Rp -	DPMPPTSP	DPH-PPTSP
2	18	4	2.01	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	12 Kag Usaha	12 Kag Usaha	Rp -	12 Kag Usaha	Rp -	12 Kag Usaha	Rp -	12 Kag Usaha	Rp -	12 Kag Usaha	Rp -	12 Kag Usaha	Rp -	DPMPPTSP	DPH-PPTSP
2	18	5				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	Rp 370,882,000	100%	Rp 448,178,400	100%	Rp 534,214,080	100%	Rp 587,838,488	100%	Rp 648,399,037	100%	Rp 2,584,409,005	DPMPPTSP	DPH-PPTSP
2	18	5	2.01			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMA dan PMDN yang dipantau, dibina dan diawasi	42	218 usaha	Rp 370,882,000	218 usaha	Rp 448,178,400	218 usaha	Rp 534,214,080	218 usaha	Rp 587,838,488	218 usaha	Rp 648,399,037	1080 usaha	Rp 2,584,409,005	DPMPPTSP	DPH-PPTSP
2	18	5	2.01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	216 Kegiatan usaha	216 Kegiatan usaha	Rp 56,350,000	216 Kegiatan usaha	Rp 67,620,000	216 Kegiatan usaha	Rp 81,144,000	216 Kegiatan usaha	Rp 89,258,400	216 Kegiatan usaha	Rp 98,184,240	216 Kegiatan usaha	Rp 392,556,640	DPMPPTSP	DPH-PPTSP
2	18	5	2.01	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha	216 Pelaku Usaha	216 Pelaku Usaha	Rp 209,982,000	216 Pelaku Usaha	Rp 251,978,400	216 Pelaku Usaha	Rp 302,374,080	216 Pelaku Usaha	Rp 332,811,488	216 Pelaku Usaha	Rp 365,872,637	216 Pelaku Usaha	Rp 1,462,818,605	DPMPPTSP	DPH-PPTSP
2	18	5	2.01	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	216 Kegiatan usaha	216 Kegiatan usaha	Rp 104,650,000	216 Kegiatan usaha	Rp 125,560,000	216 Kegiatan usaha	Rp 150,696,000	216 Kegiatan usaha	Rp 165,765,800	216 Kegiatan usaha	Rp 182,342,160	216 Kegiatan usaha	Rp 729,033,760	DPMPPTSP	DPH-PPTSP
2	18	6				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang melaporkan kegiatan Penanaman Modal	100%	100%	Rp 15,000,000	100%	Rp 18,500,000	100%	Rp 18,150,000	100%	Rp 19,965,000	100%	Rp 21,961,500	100%	Rp 91,576,500	DPMPPTSP	DPH-PPTSP
2	18	6	2.01			Pengelolaan Data dan Informasi Pertizinan dan Non Pertizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha yang membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100%	100%	Rp 15,000,000	100%	Rp 18,500,000	100%	Rp 18,150,000	100%	Rp 19,965,000	100%	Rp 21,961,500	100%	Rp 91,576,500	DPMPPTSP	DPH-PPTSP
2	18	6	2.01	01		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pertizinan dan Non Pertizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersejadinya Data dan Informasi Pertizinan dan Non Pertizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Didajah, Ditaji dan Dimanfaatkan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dok	12 Dok	Rp 15,000,000	12 Dok	Rp 18,500,000	12 Dok	Rp 18,150,000	12 Dok	Rp 19,965,000	12 Dok	Rp 21,961,500	12 Dok	Rp 91,576,500	DPMPPTSP	DPH-PPTSP
										Jumlah.....			Rp 3,080,627,787	Rp 3,818,138,344	Rp 4,238,850,763	Rp 4,888,538,607	Rp 5,671,727,884	Rp 21,508,883,384	DPMPPTSP	DPH-PPTSP		

Teluk Dalam, 25 Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP

Kabupaten Nias Selatan

INTANSANI HARIA, SE, MM

NIP. 19730919199032 2 007

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2022-2026**

No.	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Alasan	Formula/Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan/Kriteria	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di PTSP	Nilai Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD yang tersedia	Predikat		Jumlah Laporan Tahunan Kinerja dan Keuangan SKPD yang telah selesai pada tahun berkenan/Jumlah seluruh laporan kinerja dan keuangan SKPD x 100	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan TA. 2022	Jumlah seluruh laporan kinerja dan keuangan SKPD, sebanyak 29 Dokumen, antara lain : 1 Dokumen Renstra, 2 Dokumen Renja/P. Renja, 4 Dokumen Laporan Evaluasi Renja, 12 Dokumen Laporan keuangan Bulanan, 2 Dokumen Laporan Keuangan Semesteran, 1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun, 2 Dokumen RKA/PRKA, 2 Dokumen DPA/P.DPA, 1 Dokumen LKJIP, 1 Dokumen LPPD, dan Dokumen LKPJ.	B	B	B	B	B
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan	Predikat		Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan TA. 2022	Penyusunan kebijakan melalui Keputusan Kepala Dinas	B	B	B	B	B	
2	Terwujudnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio		Jumlah Tenaga Kerja bekerja pada perusahaan/Jumlah Seluruh PMA/PMDN x 100 %	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan TA. 2022	Pelaksanaan Sosialisasi atau Bimtek tentang Kemudahan Berusaha	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5
					Persentase Penerbitan izin yang diajukan oleh pelaku usaha	Persentase		Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Nias Selatan TA. 2022	Penyajian Informasi Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang Transparan dan Lengkap	100%	100%	100%	100%	100%	

Telukdalam, 25 Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Kabupaten Nias Selatan,



INTANSANI HARIA, SE.,MM
Pembina Tk. I
NIP. 19730919 199303 2 007

RENCANA AKSI PERUBAHAN TAHUN 2022

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP KABUPATEN NIAS SELATAN

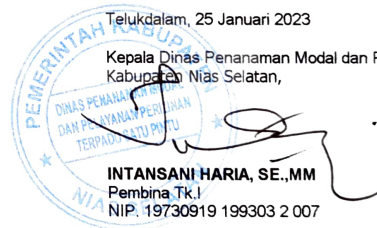
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (TRIWULAN)				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/KEGIATAN (OUTPUT))	TARGET KINERJA	ANGGARAN	RENCANA AKSI	JADWAL KEGIATAN				KET
		I	II	III	IV						TRIWULAN				
											1	2	3	4	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Akuntabel dan Transparan	100%	792,499,915						
		7 Dokumen				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	29,122,900						
				4 Dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7,300,000	Menyiapkan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				√	
		1 Dokumen				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7,207,500	Menyiapkan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	√				
		1 Dokumen				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7,350,200	Menyiapkan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	√				
				2 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	7,265,200	Menyiapkan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				√	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	75,609,500						
		3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	60,840,000	Pembayaran honor Pengelola Keuangan dan Tunjangan ASN	√	√	√	√	
					1 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7,418,000	Menyiapkan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun					√
		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	7,351,500	Menyiapkan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan semesteran SKPD	√	√	√	√	

						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100%	428,727,370						
		1 Paket				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,607,500	Menyiapkan bahan dan alat-alat listrik		√			
		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	63,066,920	Menyiapkan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	√	√	√	√	
		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	60,519,400	Pengadaan ATK dan Makan Minum	√	√	√	√	
		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14,932,350	Menyiapkan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	√	√	
		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	288,601,200	Menyiapkan Bahan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	√	√	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	14 Laporan	118,760,000						
		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,500,000	Pembelian Materi	√	√	√	√	
		1 Laporan	1 Laporan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	1 Laporan	2,060,000	Pembayaran tagihan pemakaian internet/indhome	√	√			
		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	115,200,000	Pembayaran Honor THL	√	√	√	√	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	100%	23,911,545						
					9 Unit	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	23,911,545						√
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara	5 Unit	116,368,600						
					4 Unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	38,189,600	Perpanjangan STNK dan Pembelian /Pergantian Suku Cadang serta BBM					√

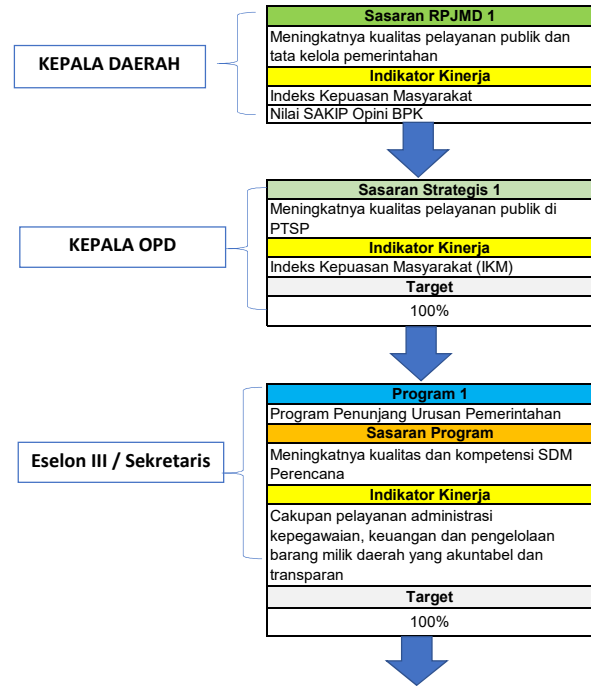
					1 Unit	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Unit	78,179,000	Pemeliharaan Printer, AC, dan Gedung Kantor							√	
Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Persentase Penerbitan Izin yang diajukan oleh pelaku usaha					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terseleenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	379,175,000									
			2 Dokumen	1 Dokumen		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/kota	216 usaha	379,175,000									
			216 Kegiatan usaha			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Penyelesaian Masalah/Hambatan Pelaku Usaha	216 Kegiatan usaha	70,000,000	Pertemuan Penyelesaian Masalah/Hambatan Kepada Pelaku Usaha			√					
				216 Pelaku Usaha		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	216 Pelaku Usaha	199,175,000	Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kepada Pelaku Usaha				√				
			216 Kegiatan usaha			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	216 Kegiatan usaha	110,000,000	Monitoring dan Evaluasi Kepada Pelaku Usaha			√					
Total Anggaran									1,171,674,915									

Telukdalam, 25 Januari 2023

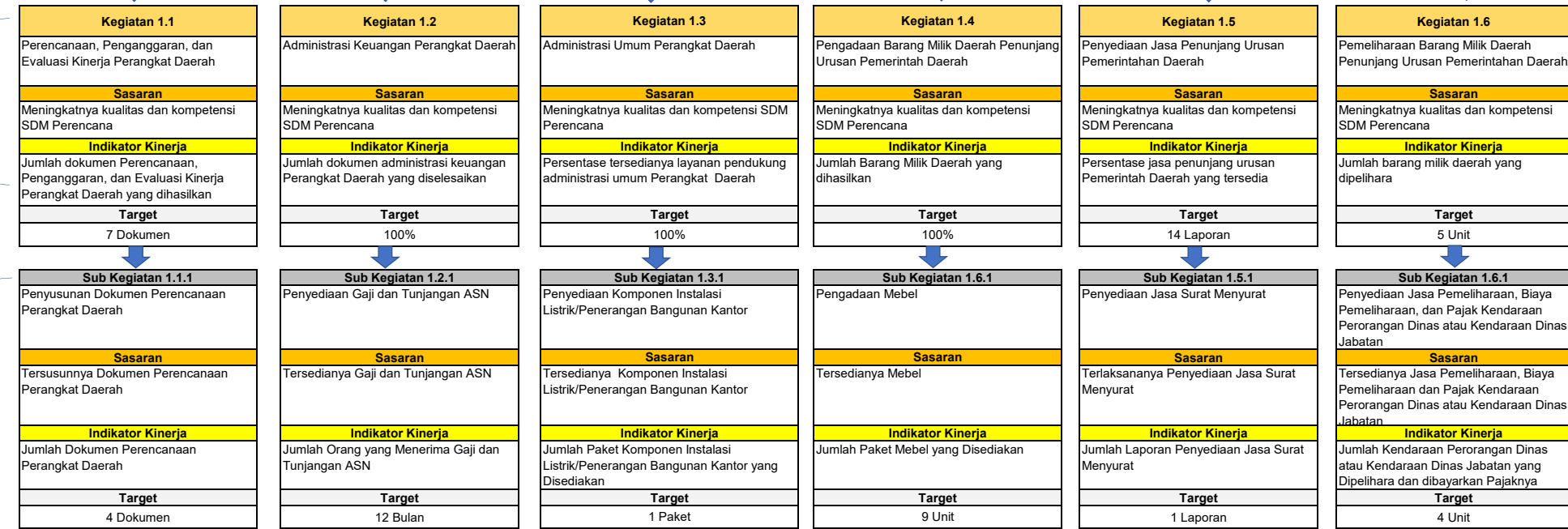
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Kabupaten Nias Selatan,



INTANSANI HARIA, SE.,MM
Pembina Tk.I
NIP. 19730919 199303 2 007



ESELON IV / KASUBBAG



JFT/JFU

Sub Kegiatan 1.1.2
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Sasaran
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Indikator Kinerja
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Target
1 Dokumen

Sub Kegiatan 1.1.3
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Sasaran
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD
Indikator Kinerja
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Target
1 Dokumen

Sub Kegiatan 1.1.4
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kinerja
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target
1 Laporan

Sub Kegiatan 1.2.2
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sasaran
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Indikator Kinerja
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Target
1 Laporan

Sub Kegiatan 1.2.3
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
Sasaran
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Indikator Kinerja
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
Target
12 Laporan

Sub Kegiatan 1.3.2
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sasaran
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Kinerja
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Target
1 Paket

Sub Kegiatan 1.3.3
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sasaran
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
Indikator Kinerja
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Target
2 Paket

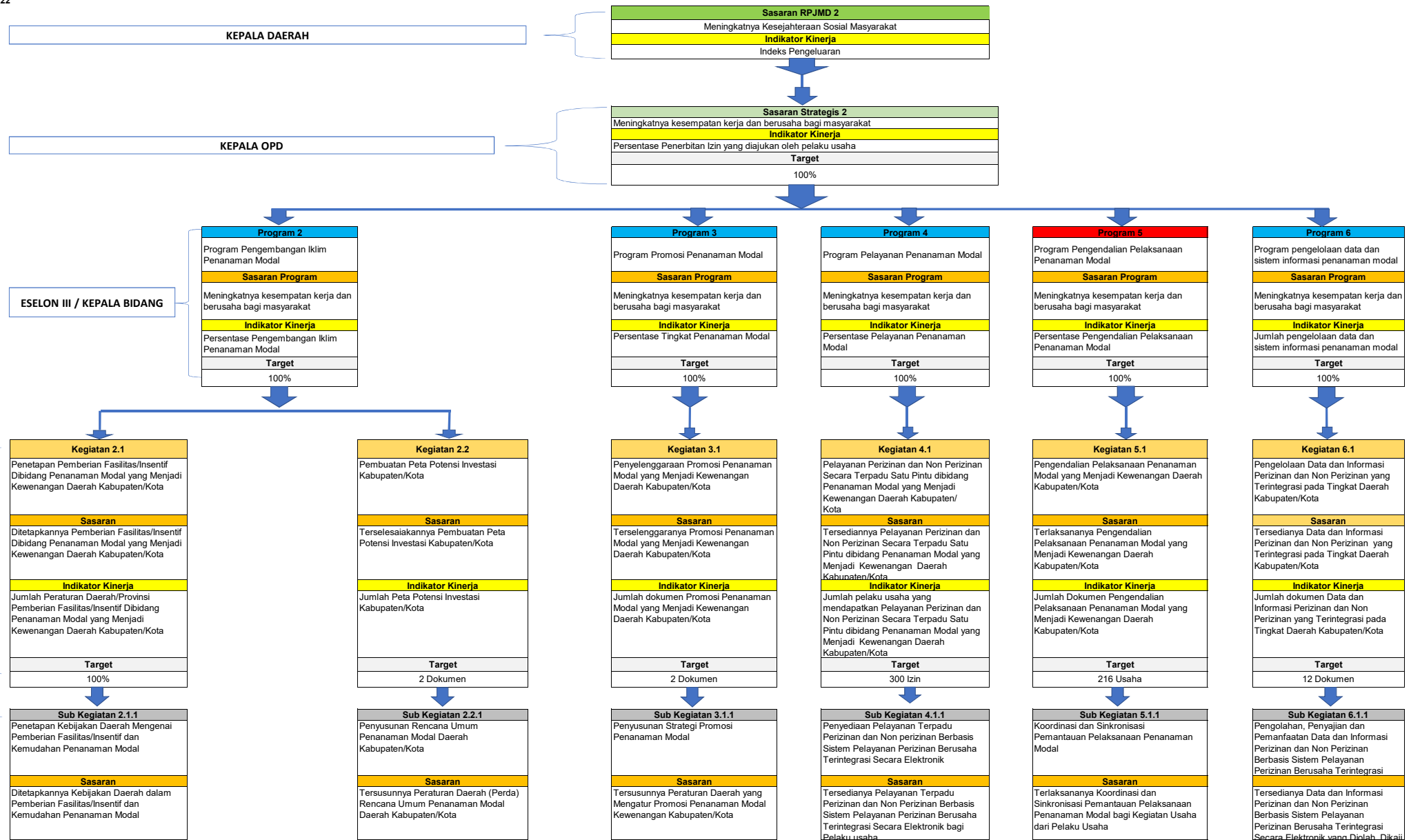
Sub Kegiatan 1.3.4
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sasaran
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
Indikator Kinerja
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Target
1 Paket

Sub Kegiatan 1.3.5
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sasaran
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator Kinerja
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target
12 Laporan

Sub Kegiatan 1.5.2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sasaran
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Kinerja
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Target
1 Laporan

Sub Kegiatan 1.5.3
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sasaran
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator Kinerja
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Target
12 Laporan

Sub Kegiatan 1.6.2
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sasaran
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator Kinerja
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Target
1 Unit



JFT/JFU

Indikator Kinerja
Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Target
12 Dokumen

Sub Kegiatan 2.1.2
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Sasaran
Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah

Indikator Kinerja
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah

Target
12 Kegiatan Usaha

Indikator Kinerja
Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Target
1 Dokumen

Sub Kegiatan 2.2.2
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Sasaran
Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja
Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Target
1 Dokumen

Indikator Kinerja
Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
Target
1 Dokumen

Sub Kegiatan 3.1.2
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota

Target
1 Dokumen

Indikator Kinerja
Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Target
300 Pelaku Usaha

Sub Kegiatan 4.1.2
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Sasaran
Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha

Indikator Kinerja
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal

Target
300 Pelaku Usaha

Sub Kegiatan 4.1.3
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Sasaran
Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Indikator Kinerja
Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Target
100 Orang

Sub Kegiatan 4.1.4
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Sasaran
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha

Indikator Kinerja
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Target
12 Kegiatan Usaha

Indikator Kinerja
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
Target
216 Kegiatan usaha

Sub Kegiatan 5.1.2
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Sasaran
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha

Indikator Kinerja
Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Target
216 Pelaku Usaha

Sub Kegiatan 5.1.3
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Sasaran
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha

Indikator Kinerja
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan

Target
216 Kegiatan usaha

Indikator Kinerja
Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan
Target
12 Dokumen



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos : 22865

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **INTANSANI HARIA, SE.,MM**
NIP : 19730919 199303 2 007
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nias Selatan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. HILARIUS DUHA, SH., MH**
Jabatan : Bupati Nias Selatan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 02 Februari 2022

Pihak Kedua,


Dr. HILARIUS DUHA, SH., MH

Pihak Pertama,


INTANSANI HARIA, SE.,MM
Pembina Tk.I
NIP. 19730919 199303 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos : 22865

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP KAB.NIAS SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di PTSP	1. Nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3. Presentase naik turunnya nilai investasi	B B 95%

	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	748.100.000,-	
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0,-	
3.	Program Promosi Penanaman Modal	0,-	
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	0,-	
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	379.175.000,-	

Teluk Dalam, 02 Februari 2022

Pihak Kedua,


Dr. HILARIUS DUHA, SH., MH

Pihak Pertama,


INTANSANI HARIA, SE.,MM
Pembina Tk.I
NIP. 19730919 199303 2 007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **INTANSANI HARIA, SE.,MM**

NIP : 19730919 199303 2 007

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nias Selatan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. HILARIUS DUHA, SH., MH**

Jabatan : Bupati Nias Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dalam perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Teluk Dalam, 10 November 2022

Pihak Pertama,

INTANSANI HARIA, SE.,MM

Pembina Tk. I

NIP. 19730919 199303 2 007

Pihak Kedua,



Dr. HILARIUS DUHA, SH., MH



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865
 Website : dpmptsp.niaselatankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PPTSP KAB. NIAS SELATAN


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di PPTSP	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B
2.	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	2. Persentase Penerbitan Izin yang diajukan oleh pelaku usaha	100 %

No.	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	792.499.915,-	
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0,-	
3.	Program Promosi Penanaman Modal	0,-	
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	0,-	
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	379.175.000,-	
6.	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	0,-	
Total Anggaran		1.171.674.915,-	

Teluk Dalam, 10 November 2022

Pihak Kedua,


HILARIUS DUHA, SH., MH

Pihak Pertama,

INTANSANI HARIA, SE.,MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19730919 199303 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN INSPEKTORAT

Jl. Arah Lagundri Km. 7 Nias Selatan, Kode Pos 22865, e-mail: inspektoratkab.nisel@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Teluk Dalam, 28 Maret 2023

a.n. Inspektur Kabupaten Nias Selatan,
Sekretaris,



SONAYAWAU GEE, SE., M.A.P.

Pembina
NIP. 19730111 200804 1 001